

e-news letter

MAR IV 2020

**PKS** PARLEMEN

KREATIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. Mardani, M.Eng

# PRESIDEN AGAR PERTIMBANGKAN OPSI LOCKDOWN



# Lockdown... Lockdown.. Lockdown.

Ratusan kali seruan karantina wilayah atau lockdown didengungkan sejumlah pihak kepada Pemerintah untuk membatasi penyebaran covid 19, jauh sebelum angka korban melonjak tajam dan bertambah. Setidaknya hingga hari senin telah terpapar 1.414 orang positif terinfeksi virus corona, sebanyak 122 diantaranya meninggal dunia dan 75 orang sembuh. Aneh bin satir, data dan informasi korban terpapar hingga meinggal yang disampaikan oleh Juru Bicara Gugus Tugas Covid 19 dr. Achmad Yuriyanto hanya dianggap hitung-hitungan angka tanpa makna, padahal sejatinya di dalamnya ada banyak nyawa warga negara yang berhak dilindungi.

Rekomendasi lockdown tidak bisa dianggap enteng, kajian ilmiah bukan hanya datang dari lingkaran oposisi tapi sejatinya datang dari para akademisi seperti Guru Besar seperti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Bukan tanpa alasan, mereka sudah sangat kepayahan karena sejumlah tenaga medis dan paramedis telah 'gugur' digaris depan melawan covid 19. Jangan ditanya bagaimana banyaknya tenaga medis yang terpapar karena kelemahan

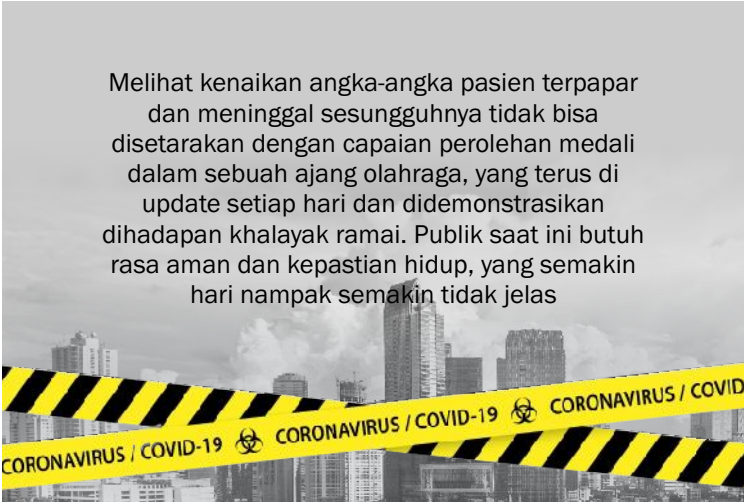
elementer; Alat Pelindung Diri (APD) yang langka dan masker deficit. Kecukupan yang disampaikan oleh otoritas tidak nampak di lapangan karena masih banyak rumah sakit

dan isu sampingan. Dari perangkat hukum yang sama UU Karantina Kesehatan No 6 tahun 2018, Pemerintah memilih pasal lain selain lockdown bernama Pembatasan

Mengingat situasi saat ini bukanlah pada kondisi perang atau separatisme akut. Pemerintah memilih menjadi penuntut hak, daripada penunai kewajiban. Karena darurat sipil

angka-angka pasien terpapar dan meninggal sesungguhnya tidak bisa disetarakan dengan capaian perolehan medali dalam sebuah ajang olahraga, yang terus di update setiap hari dan didemonstrasikan dihadapan khalayak ramai.

Publik saat ini butuh rasa aman dan kepastian hidup, yang semakin hari nampak semakin tidak jelas. Banyak pertanyaan mendasar, hampir tak ada jawaban pasti. Mengapa angka kematian terus bertambah? Mengapa harus terus bertambah? Langkah apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah? Meski sudah ada, namun lambat panas dan cenderung 'mengentengkan' urusan hingga pada akhirnya nampak tergapag-gagap mengantisipasi dampak wabah ini yang semakin membesar dan meluas. Pemerintah seakan sedang bermain-main dengan nyawa manusia. Mengambil tanggung jawab terlemah dalam kondisi terburuk dengan menerapkan darurat sipil. Sudah salah diagnosis, salah resep dan tidak tepat sasaran. Lockheart atau sudah terkunci hatinya. Inalillahi..



Melihat kenaikan angka-angka pasien terpapar dan meninggal sesungguhnya tidak bisa disetarakan dengan capaian perolehan medali dalam sebuah ajang olahraga, yang terus di update setiap hari dan didemonstrasikan dihadapan khalayak ramai. Publik saat ini butuh rasa aman dan kepastian hidup, yang semakin hari nampak semakin tidak jelas

hingga hari ini meronta-ronta kekurangan APD.

Desakan karantina wilayah (lockdown) terdengar 'parau dan sumbang' hingga ke telinga Pemerintah, dianggap angin lalu

Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan ditambah darurat sipil. Sebuah gagasan yang lahir dari lemahnya diagnosa. Apa yang diminta dengan apa yang diberi, jauh realitas dari harapan.

lebih senang mengatur dibandingkan mengambil tanggung jawab menjamin banyak orang dengan akselerasi anggaran. Tega! Melihat kenaikan

# Mardani: Presiden Jokowi agar Pertimbangkan Opsi Lockdown

Saya mendesak Pemerintah menggunakan opsi Lockdown untuk mencegah korban yang semakin banyak. Rapid test tidak efektif melihat statistik yang berkembang saat ini

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Anggota Komisi II DPR RI

Jakarta (25/03) -- Inisiator gerakan #KamiOposisi Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan opsi Lockdown ketimbang rapid test dalam menghadapi serangan wabah Covid-19 di Indonesia.

Mardani menilai opsi rapid test tidak efektif melihat fenomena statistik yang berkembang.

"Saya mendesak Pemerintah menggunakan opsi Lockdown untuk mencegah korban yang semakin banyak. Rapid test tidak efektif melihat statistik yang berkembang saat ini," kata Mardani, Selasa (24/03/2020).

Pada saat yang sama, Mardani melihat kurangnya kesadaran physical distancing dari masyarakat karena minimnya sosialisasi dan komunikasi bencana yang tidak baik.

Lebih lanjut, menurut Anggota Komisi II DPR RI ini, ketidaktegasan pemerintah memilih opsi Lockdown berimbang masih banyak perusahaan yang tidak membuat kebijakan Work From Home (WFH) kepada pegawainya, menjadikan Indonesia memiliki angka kematian tertinggi dari pada rata-rata negara ASEAN.

"Kebijakan yang tanggung-tanggung dampaknya seperti sekarang. Pengusaha dan masyarakat juga harus ditegaskan untuk #WFH #StayAtHome." Kata Mardani. Apalagi menurut pria kelahiran Betawi itu sebentar lagi bulan Ramadhan, Pemerintah akan lebih kewalahan dengan tradisi di nusantara.

"Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadhan, semakin tidak tegas pemerintah untuk melakukan opsi Lockdown, penyebaran wabah ini akan semakin tak terkendali dan korban yang lebih besar," ujar Anggota Komisi II DPR RI ini.

Mardani memang mengakui kebijakan Lockdown tidak populer, tapi lebih baik terlambat atau tidak sama sekali.

"Memang kebijakan ini pasti tidak populer, tapi tidak ada pilihan lain untuk kondisi pandemi Global ini. Pak Presiden Yth. Kita perlu belajar dari negara-negara di Eropa, selain kita punya kekhasan negara kepulauan, jumlah



penduduk kita juga terbesar ke-4 di dunia. Kita terus berkejaran dengan waktu. Semoga Indonesia bisa pulih dan bangkit dari wabah ini." pungkasnya

# Dimiyati Minta Mendiknas Buat Program Pendidikan Lewat Televisi, Cegah Covid 19

Dalam kondisi darurat covid 19 semestinya Pemerintah RI memprogramkan mengajarkan anak-anak sekolah lewat TVRI Nasional diatur waktunya, dari jam 5 pagi sampai dengan jam 23 malam."

## Dr. H.R. A. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten II

Pandeglang (25/03) — Setelah BNPB menerbitkan Keputusan terkait perpanjangan Status Keadaan Terentus Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia sampai 29 Mei 2020 mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Dimiyati Natakusumah, Anggota Fraksi PKS dari Banten 1 (Pandeglang-Lebak) memberikan perhatian khusus terhadap keberlangsungan proses pembelajaran para siswa, dengan meminta pemerintah untuk mengganti kebijakan meliburkan sekolah dan belajar di rumah dalam upaya pencegahan covid 19. Menurut Dimiyati, Peme-

rintah Indonesia seharusnya membuka program pendidikan melalui televisi.

"Dalam kondisi darurat covid 19 semestinya Pemerintah RI memprogramkan mengajarkan anak-anak sekolah lewat TVRI Nasional diatur waktunya, dari jam 5 pagi sampai dengan jam 23 malam." tegas Dimiyati Natakusumah kepada media, Selasa (24/03/2020)

Dikatakan Dimiyati dari Dapil I Banten ini, dalam program belajar via televisi itu, Mendiknas segera membuat program tersebut setiap hari disaat anak-anak belajar dirumah.

Sementara untuk jadwal misalnya bias dibuat sekema kelas 1 SD mulai jam 7 sampai dengan 9, Kelas 2 SD jam 9 s/d 11, Kelas 3 SD jam 11 s/d 13, Kelas 4 SD jam 13 s/d 15, Kelas 5 SD jam 15 s/d 17, dan Kelas 6 SD jam 17 s/d 19. Sedangkan untuk SMP dari kelas 7 jam 19 s/d 21, SMP kelas 8 jam 21 s/d 23, SMP kelas 9 jam 5 s/d 7 pagi.

"Untuk pendidikan disesuaikan dengan kurikulum belajar nasional." katanya, seraya menambahkan bahwa setiap hari disesuaikan mata pelajarannya dengan program belajar disekolah.



# APD Tenaga Medis Minim, Politisi PKS Siap Dipotong Gaji

Perlu saya tegaskan, bahwa mereka (para dokter dan tenaga medis) adalah pahlawan rakyat Indonesia, mereka bekerja tanpa kenal lelah, tidak melihat lagi waktu, dan tanpa kenal henti,serta bekerja dalam resiko yang cukup tinggi.

## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (25/03) — Fraksi PKS DPR kembali menyerukan Gerakan Nasional kepada para Legislatornya. Setelah gerakan pembagian masker dan disinfektan gratis di rumah ibadah, Fraksi PKS menginstruksikan Anggota Legislatornya potong gaji bulan Maret untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis.

Anggota komisi VIII DPR RI fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis mengatakan Ribuan orang dalam penanganan covid-19 saat ini.

"Terbukti per tanggal 24

maret hampir 700 kasus dinyatakan positif Corona. Tetapi kelangkaan APD (alat pelindung diri) bagi tenaga medis terjadi dimana-mana", ungkapnya.

Politisi PKS ini juga menyampaikan bahwa dirinya siap menjalankan intruksi pimpinan Fraksi.

"Saya bersedia gaji saya dipotong, kami semua ingin bantu para tenaga medis, karena mereka adalah garda terdepan dalam memerangi wabah covid-19 ini" ujarnya.

Selain itu, langkah ini juga

diharapkan iskan bisa diikuti oleh partai-partai lainnya.

"Perlu saya tegaskan, bahwa mereka (para dokter dan tenaga medis) adalah pahlawan rakyat Indonesia, mereka bekerja tanpa kenal lelah, tidak melihat lagi waktu, dan tanpa kenal henti,serta bekerja dalam resiko yang cukup tinggi. Maka kami berkewajiban membantu dalam rangka pemenuhan APD seoptimal mungkin yang bisa kita usahakan dengan memotong gaji selama bulan maret ini, sebelumnya juga alhamdulillah saya mendistribusikan ribuan kelengkapan kesehatan seperti botol alkohol dan lainnya ke beberapa klinik didaerah bekas, kita lakukan ini untuk membantu para tenaga medis dalam menangani para pasien covid-19" tegas iskan.

Iskan juga menyayangkan sikap pemerintah yang mengklaim telah membeli perlengkapan APD bagi tenaga medis, tetapi faktanya dilapangan masih terjadi kelangkaan dan jauh dari



jumlah standard yang yang harus dipenuhi.

"Jadi mari seluruh komponen di negeri ini, baik pemerintah dan masyarakat saling membantu,saya juga berharap, langkah PKS dalam memotong gaji ini dapat diikuti

oleh lintas partai lainnya baik ditingkat DPRD provinsi hingga ke DPRD kab/kota agar dalam pemenuhan kebutuhan APD pahlawan kemanusiaan, yaitu dokter,perawat, dan para tenaga medis lainnya bisa segera terealisasi." Tutup iskan.

## Bantu Wujudkan Kesetiakawanan Sosial

# HNW: Jangan Beri Stigma Negatif Tenaga Kesehatan

Tenaga medis memiliki prosedur perlindungan diri sebelum dan sesudah merawat pasien. Insya Allah, mereka sehat dan bersih sehingga ketika kembali ke rumah atau tempat kost, mereka tetap menjaga prosedur kesehatan. Termasuk ketika mereka akan pulang ke rumah masing

### Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI II

Jakarta (25/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyesuaikan tindakan warga yang mulai curiga atau menolak tenaga medis dan paramedis di lingkungannya karena takut tertular wabah virus corona baru.

Wakil Ketua MPR RI ini juga mendorong agar warga menghormati para tenaga medis, dan membangkitkan kembali semangat kesetiakawanan sosial (gotong royong) di tengah masyarakat.

Di sosial media beredar curhat tenaga medis bahwa dirinya dan anak-anaknya ada

yang di jauhi dan ditolak oleh lingkungannya.

"Kita memahami kekhawatiran masyarakat akan bahaya virus corona. Namun, sikap menolak dan menstigma tenaga medis sebagai penyebar virus justru kontraproduktif. Para dokter, perawat dan petugas administrasi rumah sakit itu sudah bertaruh nyawa untuk merawat dan melayani pasien. Dengan segala keterbatasan dukungan dari pemerintah. Sampai-sampai mereka tak lagi hiraukan keselamatan mereka. Warga harusnya memberi simpati dan

apresiasi atas dedikasi dan pengorbanan mereka," ujar Hidayat.

Tetapi HNW juga memahami bahwa ketakutan masyarakat itu merupakan efek samping dari berita yg mereka konsumsi soal penyebaran Covid-19 beserta dampak-dampaknya, dan juga dari physical distancing (pembatasan jarak/gerak fisik) masyarakat, karena harus tinggal di rumah dalam waktu cukup lama. Bahkan, perlu karantina atau isolasi mandiri bila ada anggota keluarga yang terparap Covid-19.

Akibatnya, sebagian masyarakat yang tidak paham prosedur medis berprasangka, tenaga medis menjadi penyebar virus.

"Itu pandangan yang keliru. Tenaga medis memiliki prosedur perlindungan diri sebelum dan sesudah merawat pasien. Insya Allah, mereka sehat dan bersih sehingga ketika kembali ke rumah atau tempat kost, mereka tetap menjaga prosedur kesehatan. Termasuk ketika mereka akan pulang ke rumah masing-



masing," jelas Hidayat.

Dari pada menabar ketakutan dan stigma yang kontraproduktif terhadap tenaga medis, Hidayat menghimbau, lebih baik warga menggalang solidaritas dan menabar empati. Misalnya, menaati arahan para ulama, pemerintah dan tenaga medis untuk tetap di rumah, dengan beraktifitas/bekerja produktif, menjaga kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat, serta menggalang bantuan untuk mendukung kinerja tenaga medis dan mendoakan tenaga medis serta agar Covid-19 segera bisa diatasi.

"Itu wujud kesetiakawanan sosial di masa kini. Jika dulu para pejuang bergandengan

tangan melawan penjajahan, maka saat ini kita bergotongroyong melawan wabah corona," Hidayat mengimbau.

Dalam rangka reses dan serap aspirasi, Hidayat yang merupakan anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta telah memberikan masker pelindung, sanitizer dan bantuan keuangan kepada warga. Pimpinan Fraksi PKS juga mendesak agar tes Covid-19 dilakukan lebih dulu terhadap pasien dan petugas medis yang membutuhkan. Itu juga yg dilakukan oleh Anggota Fraksi PKS lainnya. Mereka juga siap potong gaji untuk bantuan penanggulangan Covid-19.

# Corona Kian Meluas, Rofik Minta Pemerintah Pertimbangkan Keputusan Lockdown

Para tenaga medis kita hari ini sudah mulai kewalahan menangani pasien Covid-19, apabila pemerintah tidak segera mengambil keputusan yang tepat, dikhawatirkan kondisi ini akan semakin buruk

## H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Komisi VII DPR RI

Jakarta (26/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto, meminta pemerintah untuk segera mempertimbangkan langkah Lock Down, mengingat wabah virus corona ini terus meluas dan memakan banyak korban.

Jumlah pasien positif terinfeksi Virus Corona (Covid-19) disebut bertambah menjadi 790 orang pada Rabu (25/03/2020). Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 58 orang, dengan jumlah yang sembuh 31 orang.

"Koreksi data 686 pasien positif kemarin, menjadi 685 kasus. Ditambah hari ini ada

105, sehingga totalnya 790 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (25/03/2020).

Dari 790 Kasus positif covid-19, sebagian besar tersebar di pulau Jawa dengan 709 Kasus Positif; Banten 67 Kasus, DKI Jakarta 463 Kasus, Jawa Barat 73 Kasus, Jawa Tengah 38 Kasus, DIY 17 Kasus dan Jawa Timur 51 Kasus. Terbesar di DKI Jakarta.

Melihat kondisi penyebaran yang semakin meluas, Rofik Mengingatkan agar pemerintah segera

mempertimbangkan langkah Lock Down.

"Saya meminta pemerintah untuk segera mempertimbangkan langkah Lock Down atau karantina wilayah, mengingat wabah virus corona ini semakin hari semakin meluas dan memakan banyak korban." Kata Rofik

Rofik menambahkan penyebaran virus corona ini paling banyak dibawa oleh para pemudik yang kembali ke kampung halaman, ini betul-betul mengerikan, daerah yang sebelumnya tidak ditemukan kasus positif corona, kini mulai ditemukan kasus positif, dan jumlahnya setiap hari semakin meningkat.

"Apabila pemerintah lambat mengambil sikap, dikhawatirkan kondisi ini akan semakin buruk dan justru akan semakin sulit untuk dikendalikan," tandasnya.

Saat ini para tenaga medis sudah kewalahan menangani pasien corona, dengan peralatan seadanya mereka terus berjibaku, dan



bertambahnya pasien Positif Covid-19 ini tidak diimbangi dengan ketersediaan tenaga medis dan peralatan yang memadai. Ini semakin memperburuk keadaan.

"Para tenaga medis kita hari ini sudah mulai kewalahan menangani pasien Covid-19, apabila pemerintah tidak segera mengambil keputusan yang tepat, dikhawatirkan kondisi ini akan semakin buruk." tambah Rofik.

Langkah Lockdown juga telah dilakukan oleh beberapa negara seperti China, italia,

Inggis, Spanyol, Malaysia, dan beberapa negara lain. Saudi baru saja melakukan lockdown untuk Makkah, Madinah dan Riyadh. Amerika Serikat juga sudah me-lockdown

SanFrancisco. Bahkan Pemerintah India juga telah mengambil langkah lockdown menyeluruh, Penduduk India sebanyak 1,3 miliar jiwa menjalani karantina wilayah alau lockdown selama tiga pekan penuh, sebelumnya tercatat 519 kasus terkonfirmasi positif corona dan 10 diantaranya meninggal dunia.

## Cegah Covid-19, Sakinah

# Sakinah: Pemerintah Harus Tegap Cepat Tutup Penerbangan ke Indonesia

“Untuk saat ini Sulawesi Tengah sudah ada satu orang yang positif Covid-19, namun demikian kita semua harus terus waspada mengingat Covid-19 terus meningkat di seluruh Indonesia

**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.**

Anggota Komisi X DPR RI

Palu (26/03) — Dalam upayaantisipasi dan mencegah penyebaran Covid-19 di Sulawesi Tengah Anggota DPR Fraksi PKS Sakinah Aljufri, meminta pemerintah segera menutup bandara.

Sakinah menyampaikan bahwa saat ini Sulawesi Tengah sudah ada satu pasien positif corona, yang sebelumnya tidak ditemukan.

Selain Sulawesi Tengah, provinsi yang mencatatkan kasus perdana pasien positif corona yaitu Aceh dengan satu kasus dan Sumatera Barat

dengan tiga kasus.

“Untuk saat ini Sulawesi Tengah sudah ada satu orang yang positif Covid-19, namun demikian kita semua harus terus waspada mengingat Covid-19 terus meningkat di seluruh Indonesia,” ungkap politikus PKS di Sulawesi Tengah di Palu, Kamis, (26/03/2020).

Menurut Sekjend WIA Pusat ini pemerintah harus menunjukkan sikap yang tegas dalam menangani pandemik corona yang setiap hari meningkat.

Sampai hari ini data nasional pantauan Covid-19 tercatat 893 terkonfirmasi positif corona, 780 sedang dalam perawatan. Sedangkan jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 35 orang dan pasien yang dinyatakan meninggal dunia sebanyak 78 orang.

“Sikap pemerintah harus tegas, dengan secepatnya menutup penerbangan dari dan ke Indonesia terlebih di daerah yang menerima tenaga kerja asing. Khususnya daerah Sulawesi Tengah, di kabupaten Morowali ada dua bandara satu bandara domestik dan yang satu lagi di kawasan industri yang terletak di kecamatan Bohodopi ada bandara khusus untuk para investor dari China.” Terang Sakinah.

Tindakan preventif pencegahan penyebaran virus korona yang oleh WHO dinyatakan sebagai darurat global harus dilakukan dengan tegas agar virus Covid-19 tidak menyebar dengan cepat.



Menurut Sakinah dalam mengantisipasi penyebarannya tidak hanya pemeriksaan di bandara saja yang diperketat namun lebih dari itu harus menutup bandara.

“Tidak hanya sekedar

pemeriksaan kesehatan di bandara saja yang diperketat, tapi untuk saat ini harus ada tindakan tegas menutup bandara-bandara sebagai pintu masuk tenaga kerja asing dari luar negeri,” kata Sakinah.

**Positif Covid-19 Bertambah,**

# Aleg PKS: Segera Berlakukannya UU Karantina Kesehatan!

Stop dulu semua program yang tidak mendesak, sehingga anggaran Negara dapat dialihkan untuk mendukung langkah-langkah cepat dan akurat untuk membasmi wabah covid-19 ini secara efektif, sebelum semuanya menjadi terlambat

**Dr. H. FAHMY ALAYDROES, M.M., M.Ed.**

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (27/03) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahmy Alaydroes, menanggapi sikap pemerintah yang kurang tegas, dalam penanganan memberaknya Covid-19 di Indonesia.

Menurut Anggota Komisi X, Pemerintah sudah selayaknya memberlakukan Undang-undang (UU) tentang Karantina Kesehatan untuk menekan merebaknya virus Corona di tanah air.

"Dalam kondisi pandemi covid-19, yg mengancam kita tanpa pandang bulu, semua harus ikut membantu sesuai kewenangan, kompetensi dan kemampuan," ungkapnya.

Menurut Fahmy, saatnya kita semua bergotong royong, membuktikan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang cerdas dan beradab

"Kita buktikan kesigapan bangsa Indonesia dalam membasmi ancaman pandemik Covid-19, yang sangat berbahaya dan mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia," tegasnya.

Apalagi, lanjut Fahmy wabah Covid-19 ini sudah menyerang negeri kita, dengan penyebaran dan penularan yang cepat, telah menewaskan puluhan korban, bahkan telah merenggut nyawa para petugas medis/paramedis yang

berkhidmat di Rumah Sakit.

"Para ahli epidemiologi, ahli penyakit dalam, ahli penyakit menular, ahli penyakit infeksius, ahli virologi dan ahli-ahli lain yang kompeten dan relevan dengan pencegahan dan pengobatan wabah covid-19 ini bekerja keras untuk menemukan cara, media, obat atau apapun yang dapat dikembangkan dan digunakan," terang Fahmy.

Fahmy menambahkan para ahli sepakat, untuk saat ini, upaya yang mendesak dan harus dilakukan adalah memutus mata rantai penularan Covid-19, dengan cara menjaga jarak sosial, mencegah kontak fisik.

"Saya mengusulkan untuk sedapat mungkin dilakukan karantina suatu wilayah yang masuk dalam zona merah, yaitu wilayah yang sudah terpapar virus covid-19 dengan korban yang berbilang dan menyebar," imbuhnya.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah memberi peringatan dan arahan, kata Fahmy, bahwa Indonesia harus bertindak lebih terarah dan memberlakukan pembatasan



sosial yang lebih ketat.

"Pengalaman berbagai Negara seperti China, Korea Selatan, Singapura, Iran, Itali dan beberapa Negara lain sudah cukup memberikan pelajaran kepada kita. Negara yang cepat, ketat dan tegas melakukan karantina dapat mengendalikannya laju penyebaran dan penularan, dan sebaliknya yang lambat dan ragu-ragu, tidak bertindak tegas kepada masyarakatnya maka laju penyebarannya dan jumlah korban yang berjatuhan lebih buruk", tandasnya.

Pemerintah, tambah Fahmy, baik pusat maupun daerah, dari Presiden sampai

kepala desa harus menjadi pemimpin yang menggerakkan semua sumberdaya dan mengajak semua pihak terlibat.

"Terutama, dalam mengimplementasikan amanah UU No 6/2018 tentang Karantina Kesehatan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan (Pasal 5 - UU No. 6/2018)," paparnya.

Selengkapnya di [Fraksi.pks.id](http://Fraksi.pks.id)

## Mau Buka Donasi dari Rakyat

# Habib Aboe Sindir Pemerintah Bekerja Seperti NGO

Ini kan aneh. Padahal selama ini pemerintah atas nama negara sudah memungut cukai dan pajak dari masyarakat. Langkah ini seolah menjadi bukti pemerintah gagap dalam penanganan corona

### **HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI**

Anggota Komisi III DPR RI

JAKARTA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi melontarkan sindiran pedasnya, terkait rencana pemerintah yang akan membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha juga masyarakat, guna membantu penanganan virus corona atau Covid-19. Kata dia, pemerintah bekerja seperti lembaga sosial atau NGO yang membuka donasi dari masyarakat.

“Ini kan aneh. Padahal selama ini pemerintah atas nama negara sudah memungut cukai dan pajak dari masyarakat. Langkah ini seolah

menjadi bukti pemerintah gagap dalam penanganan corona,” sebut Habib Aboebakar sapaan Ketua MKD DPR RI itu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (27/3/2020).

Lebih aneh lagi, sambung Habib Aboebakar, disisi lain pemerintah masih ngotot untuk memindahkan Ibu Kota. Tentu ini mengundang tanya bagi rakyat, kenapa anggaran untuk pindah Ibu Kota ada, sedangkan untuk penanganan wabah corona harus saweran dari rakyat?

“Tentunya ini membuat spekulasi buruk bagi rakyat,

seolah pemindahan Ibu Kota dianggap lebih penting dari keselamatan warganya. Salus populi suprema lex, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Seharusnya penanganan Covid-19 menjadi prioritas utama dibandingkan program lain, termasuk rencana pindah Ibu Kota,” tegas dia.

Diingatkan Habib Aboe bahwa anggaran dan sumber daya negara seharusnya semaksimal mungkin diarahkan untuk penanganan Covid-19. Dan sebaiknya pembukaan rekening patungan tersebut dibatalkan, karena negara masih memiliki APBN yang bisa dialokasikan untuk penanganan wabah covid-19 tersebut.

“Gunakan anggaran dari APBN, bukannya malah menarik sumbangan dari rakyat. Jadi, ditengah masalah seperti sekarang, pemerintah jangan berbuat yang aneh-anehlah,” pinta Ketua DPP PKS Korda Kalimantan itu. (Kds)



# Bantu Tenaga Medis, HNW Ajak DPR hingga DPRD Potong Gaji

“Pemerintah juga wajib mencegah lumpuhnya sistem layanan kesehatan karena lonjakan kasus yang tinggi. Maka pemerintah agar lakukan lockdown parsial untuk DKI Jakarta dan zona merah lainnya, sebagaimana sudah dilaksanakan di 17 negara, dan sudah disuarakan oleh anggota DPR, PB IDI, FKUI, agar tidak terjadi lonjakan kasus Corona.

## **Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (27/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, menyampaikan keprihatinannya terhadap masih sangat kurangnya APD untuk para tenaga medis Indonesia baik di Jakarta maupun di luar Jakarta.

“Padahal korban makin banyak berjatuhan, dan virus Covid-19 makin banyak menyebar ke berbagai daerah, sehingga banyak Tenaga Medis

yang tertular bahkan hingga ada yang wafat juga. Dalam upaya mengatasi wabah Covid-19 yang sudah menjadi teror ini, Tenaga Kesehatan adalah pahlawan bangsa dan pahlawan dunia. Mereka rela dikerahkan di garis depan, berjibaku melawan virus Corona, tetapi mirisnya sampai saat ini masih banyak yang tidak dibekali dengan “alat tempur” yang memadai seperti APD, kondisi

mengkhawatirkan yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka,” ujar Hidayat di sela-sela aktivitas WFH pada masa reses DPR-RI di Jakarta (27/03).

Oleh karena itu, Anggota DPR-RI Fraksi PKS Dapil DKI Jakarta II ini mengapresiasi keputusan FPKS untuk memotong gaji anggota DPR dan DPRD dari FPKS di seluruh Indonesia, yang kemudian mereka belikan APD dan telah mereka sumbangkan secara langsung untuk Tenaga Kesehatan melalui PB IDI dan PP PNSI (Persatuan Perawat Nasional Seluruh Indonesia), hal yang disambut sangat positif oleh PB IDI dan PP PNSI. Melihat fakta terkait Covid-19 tersebut, HNW juga menyerukan kepada seluruh wakil Rakyat, anggota DPR-RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten dari partai-partai yang lain, agar membersamai FPKS dengan memotong gaji anggota DPR/DPRD se-Indonesia untuk membantu Rakyat dan Para Tenaga Kesehatan, bahkan membantu



Negara mengatasi pandemi Covid-19 yang oleh Pemerintah telah dinyatakan menjadi bencana nasional non alam.

“Kami Fraksi PKS di seluruh Indonesia, sudah putusan untuk potong gaji demi membantu kekurangan APD tersebut. Namun kekurangan APD tidak hanya terjadi di Jabodetabek, melainkan di banyak Provinsi dan Kabupaten di Indonesia. Maka perlu juga anggota dewan lainnya dari seluruh partai, dari pusat hingga provinsi, kabupaten dan kota, untuk juga turut melakukan potong gaji seperti PKS, demi membantu para Tenaga Kesehatan, Rakyat di dapilnya masing-masing,” ujar Wakil Ketua MPR RI ini.

Di samping itu Hidayat

mengingatkan bahwa pemenuhan kebutuhan APD hanyalah salah satu cara dalam membantu tenaga medis.

“Pemerintah juga wajib mencegah lumpuhnya sistem layanan kesehatan karena lonjakan kasus yang tinggi. Maka pemerintah agar lakukan lockdown parsial untuk DKI Jakarta dan zona merah lainnya, sebagaimana sudah dilaksanakan di 17 negara, dan sudah disuarakan oleh anggota DPR, PB IDI, FKUI, agar tidak terjadi lonjakan kasus Corona, bisa diatasi dan dipotong mata rantai penyebarannya, agar Indonesia tak jadi epicentrum baru penyebaran pandemi Covid-19, agar tak jadi tragedi kemanusiaan,” tegas Hidayat.

# Anggota Fraksi PKS Siap Dipotong Gaji untuk Bantu Tenaga Medis Covid-19

Kita bekerja semampu kita. Bila terus mengandalkan pemerintah, ini persoalan corona terus menuntut semua pihak untuk dapat bekerja sama memberikan yang terbaik pada penyelesaiannya. Kita Sama-sama lah untuk berkontribusi, tidak saling menyalahkan, yang penting ada kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

## **Drs. HAMID NOOR YASIN, M.M**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah IV

Jakarta (24/03) — Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah IV, Hamid Noor Yasin membagikan Hand Sanitizer di beberapa titik di wilayah daerah pemilihannya.

Hal ini terus dilakukan seiring dengan perpanjangan masa reses menunda masa sidang agar dapat melayani rakyat lebih panjang sekaligus mendukung proses karantina asal di ibukota.

"Ini adalah bentuk khidmat PKS kepada rakyat. Salah

satunya ya membagikan hand sanitizer dan masker sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran virus corona. Dan saya sangat mendukung langkah pimpinan kami di FPKS, akan memotong gaji seluruh anggota DPR dari PKS di bulan maret, untuk membantu tenaga medis dalam pengadaan APD atau alat pelindung diri", urai Hamid.

Hamid mengatakan, bahwa per hari ini, (24/03/2020), fraksinya

mengumumkan kepada seluruh anggota FPKS untuk bersiap dipotong gaji bulan maret yang akan dipergunakan memenuhi kekurangan APD.

Meski beberapa waktu lalu pemerintah mengumumkan telah mendaratkan 50 juta APD, namun di lapangan banyak ditemui keluhan tenaga medis di seluruh wilayah Indonesia yang menyatakan APD masih kurang.

"Kita bekerja semampu kita. Bila terus mengandalkan pemerintah, ini persoalan corona terus menuntut semua pihak untuk dapat bekerja sama memberikan yang terbaik pada penyelesaiannya. Kita Sama-sama lah untuk berkontribusi, tidak saling menyalahkan, yang penting ada kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat", ucap Hamid.

Politisi PKS ini juga menyangkan, berbagai informasi hoax yang banyak beredar di seputar wabah virus covid-19 ini. Ia mengatakan, bahwa orang-orang yang mengambil manfaat dari wabah



ini sangat keterlaluhan semisal mengambil keuntungan ekonomi maupun keuntungan ketenaran. Hal ini ia temui banyak beredar di sosial media.

"Saya mengajak seluruh masyarakat, terutama di derah pemilihan saya, yang meliputi Kabupaten Sragen, Karanganyar dan Wonogiri untuk dapat bahu-membahu

melawan wabah virus corona ini. Isolasi diri, menjaga kontak fisik (physical distance), memberi bantuan bagi yang mampu, solidaritas sesama dengan tidak memborong bahan makanan dan masker berlebihan merupakan salah satu bentuk memerangi corona ini", tutup Hamid Noor Yasin.

# DPR Ingatkan Tiga Hal Terkait Alihfungsi Gedung Menjadi Rumah Sakit Darurat

“Pengalihfungsian ini memang situasi darurat, namun saya harap soal standarisasi ruang isolasi dan ruang rawat , ketersediaan alat dan SDM serta persoalan limbah harus tetap disiapkan dengan sangat sangat teliti dan cermat, justru demi tidak terjadinya hal-hal tidak diinginkan ke depannya

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si.,M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

Jakarta (23/03) — Upaya pemerintah mengalihfungsikan satu area dan bangunan yang memungkinkan menjadi semacam Rumah Sakit Darurat untuk merawat para pasien yang terjangkit virus corona memang menjadi satu pilihan paling realistis demi menghemat waktu dan biaya daripada membangun gedung baru.

Namun tiga hal mendasar diingatkan anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah agar bisa dilakukan secara cermat dan teliti saat dilakukan upaya alih fungsi gedung atau

wilayah. Tiga hal tersebut adalah persoalan standarisasi ruang rawat, ketersediaan alat dan SDM serta persoalan limbah.

Salah satu contoh, urai Ledia, adalah Wisma Atlet Kemayoran yang disebut pemerintah akan dialihfungsikan menjadi tempat perawatan pasien covid-19. Dari kesepuluh tower dinyatakan bisa menampung hingga 22 ribu pasien dengan 2400 kamar dinyatakan sudah siap pada Senin ini (23/3).

“Pengalihfungsian ini memang situasi darurat, namun

saya harap soal standarisasi ruang isolasi dan ruang rawat , ketersediaan alat dan SDM serta persoalan limbah harus tetap disiapkan dengan sangat sangat teliti dan cermat, justru demi tidak terjadinya hal-hal tidak diinginkan ke depannya.” ujarnya.

“Menyiapkan kamar rawat dengan spesifikasi dan standar khusus dalam waktu singkat tentu akan menjadi tantangan tersendiri, membutuhkan biaya tak sedikit pula. Tetapi jangan sampai menjadi kurang cermat dan teliti karena alasan keterbatasan waktu dan biaya.” Kata Ledia mengingatkan.

Begitu pula soal ketersediaan alat dan tenaga kesehatan yang memadai. Semakin hari ketersediaan obat-obatan dan peralatan pendukung kesembuhan pasien serta peralatan pendukung kerja dan pelindung kesehatan bagi para tenaga kesehatan makin terbatas jumlahnya.

Padahal untuk tempat yang dikhususkan sebagai



tempat perawatan pasien covid-19 maka ketersediaan obat, alat dan APD bagi nakes ini harus menjadi prioritas utama. Sederhananya saja soal masker medis dan hand sanitizer yang semakin langka. Lebih lanjut adalah pakaian APD.

“Kalau perlu produksi dan peredaran peralatan pendukung kesembuhan pasien serta peralatan pendukung kerja dan pelindung kesehatan bagi para tenaga kesehatan ini segera ditata dengan aturan khusus hingga tidak ada lagi penimbunan atau bahkan salah manfa-

at. Sebab saat ini yang banyak terjadi masyarakat ikut berbondong-bondong menjadi pemakai barang yang lebih dibutuhkan oleh tenaga kesehatan,” Sambung adeg Fraksi PKS ini. Selengkapnyanya di fraksi.pks.id

Prioritaskan Tenaga Medis dan Rakyat

# Fraksi PKS DPR Minta Rapid Test Corona untuk Anggota DPR dan Keluarga Dibatalkan

Kami menerima informasi tersebut dan Fraksi PKS menyatakan sikap meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk yang punya gejala sakit. Tidak elok di tengah kondisi saat ini dimana tenaga medis dan rakyat lebih membutuhkan ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarganya

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (23/03) – DPR RI rencananya akan melakukan rapid test corona kepada seluruh Anggota DPR dan keluarganya pada 26-27 Maret 2020 di Rumah Jabatan Anggota DPR. Hal itu disampaikan oleh Sekjen DPR Indera Iskandar di Jakarta (23/3) dan merupakan kesimpulan Rapat Pengganti Bamus pekan yang lalu.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta rencana tersebut dibatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya untuk anggota yang terindikasi sakit dalam pemeriksaan awal.

“Kami menerima informasi tersebut dan Fraksi PKS menyatakan sikap meminta Sekjen DPR membatalkan atau setidaknya diprioritaskan hanya

untuk yang punya gejala sakit. Tidak elok di tengah kondisi saat ini dimana tenaga medis dan rakyat lebih membutuhkan ada pengadaan rapid test khusus anggota DPR dan keluarganya,” tegas Jazuli.

Kita menyaksikan sendiri tenaga medis dan rakyat terdampak lebih membutuhkan. Fraksi PKS sendiri selama beberapa hari mencanangkan gerakan berbagi masker dan disinfektan gratis ke tempat-tempat ibadah dan rumah sakit/klinik. Dan aspirasi mereka agar diprioritaskan kebutuhan mereka atas alat pelindung diri (APD) dan seluruh instrumen pemeriksaan corona.

Anggota Komisi I DPR ini meminta tidak ada perbedaan perlakuan antara anggota DPR dan keluarganya dengan masyarakat pada umumnya. Protokol kesehatan tentu diberlakukan di Komplek DPR baik di Kantor maupun Rumah Dinas, tapi untuk tes corona cukup diprioritaskan kepada



anggota yang memang terindikasi sakit.

Anggota dan keluarga yang mengalami gejala sakit tentu harus istirahat dan mengkarantina diri di rumah atau berkonsultasi dengan dokter atau rumah sakit.

“Intinya Fraksi PKS DPR tidak setuju jika diadakan tes corona kepada seluruh anggota DPR dan keluarganya. Di tengah kondisi seperti sekarang setiap anggota DPR harus

memprioritaskan kebutuhan tenaga medis dan mereka yang terpapar langsung dalam menangani virus corona. Jika ada indikasi atau gejala sakit anggota DPR dan keluarganya bisa berkonsultasi pada dokter dan merujuk rumah sakit secara mandiri sebagaimana masyarakat umumnya,” pungkas Jazuli.



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**H. Sukamta, Ph.D**

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Polhukam

Kondisi Saat Ini  
Darurat Kesehatan,  
**DPR: Butuh Segera  
Karantina Wilayah**

Niatan baik masyarakat dan Pemda ini mestinya didukung dengan segera diterbitkan payung hukum PP-nya, agar karantina wilayah berjalan optimal. Jika pemerintah lambat berbuat, berapa banyak lagi nyawa yang harus melayang

# DPR: Kondisi Saat Ini Darurat Kesehatan, Butuh Segera Karantina Wilayah

Saya tidak tahu apa sesungguhnya yang ada di benak pak Presiden sehingga jauh hari menyampaikan tidak akan 'lockdown'. Pak Presiden, yang sedang kita hadapi saat ini pandemi virus corona, telah menyebar dengan cepat dan menjadi ancaman nyata bagi kesehatan dan nyawa rakyat Indonesia.

## H. SUKAMTA, Ph.D

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Polhukam

Menanggapi pernyataan Presiden RI, Joko Widodo pada saat membuka rapat terbatas terkait Laporan Gugus Tugas Covid-19 yang disiarkan langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden (Senin 30 Maret 2020), bahwa dirinya akan meminta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, "physical distancing" dilakukan lebih tegas, disiplin, dan lebih efektif lagi, sehingga perlu didampingi kebijakan darurat sipil. Wakil Ketua Fraksi

PKS, Sukamta menyatakan bahwa saat ini yang dibutuhkan masyarakat langkah konkrit dan segera untuk mencegah penyebaran Virus Corona dan itu pilihannya adalah dengan melakukan Karantina Wilayah sebagaimana diatur di dalam UU no. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

"Penyebaran virus yang saat ini hampir menyetuh semua provinsi di Indonesia tidak cukup diatasi dengan kebijakan pembatasan sosial

berskala besar serta tidak perlu disikapi dengan kebijakan darurat sipil. Saya tidak tahu apa sesungguhnya yang ada di benak pak Presiden sehingga jauh hari menyampaikan tidak akan 'lockdown'. Pak Presiden, yang sedang kita hadapi saat ini pandemi virus corona, telah menyebar dengan cepat dan menjadi ancaman nyata bagi kesehatan dan nyawa rakyat Indonesia. Dalam UU Kekarantinaan Kesehatan kondisi ini disebut sebagai Kedauratan Kesehatan, bukan Darurat Sipil. Langkah yang perlu dilakukan didalam UU tersebut juga sudah sangat jelas jika arahnya membatasi pergerakan orang agar tidak keluar masuk yang dilakukan adalah karantina wilayah atau istilah populemnya 'lockdown'. Jika masalahnya adalah perlu Peraturan Pemerintah untuk sebagai peraturan pelaksanaan, segera buat PP tersebut. Itu menjadi domain pemerintah sepenuhnya, mestinya bisa segera dibuat," jelas Sukamta.

Anggota Komisi 1 DPR RI



ini lebih lanjut melihat setelah Pemerintah menetapkan status darurat bencana Covid-19 pada tanggal 29 Februari 2020 atau sudah berjalan selama 1 bulan, berbagai langkah yang dilakukan belum bisa menekan perkembangan virus corona, sebaliknya virus semakin menyebar dengan kenaikan pasien positif lebih dari 500 persen. Mestinya pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh. Pemerintah juga bisa mengambil pengalaman negara-negara lain yang berhasil menekan penyebaran virus serta menekan jumlah

korban jiwa seperti China, Korea Selatan, dan Singapura.

"Pengalaman negara lain menyikapi 2 pilihan, lockdown atau perbanyak test. Sejauh ini pemerintah mencoba memperbanyak test dengan mengimpor rapid test yang oleh beberapa ahli dikatakan tingkat akurasi 30-an persen. Itu pun jumlahnya masih terbatas, sehingga tidak mampu mengimpor kecepatan penyebaran virus. Jika menimbang ini, pilihan lockdown mestinya tidak ditunda-tunda," tegas Sukamta.

Selengkapnya di Fraksi.pks.id



إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

*Keluarga besar Fraksi PKS DPR RI  
Turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah  
Anggota DPR RI*



**H. Imam Suroso, MM**  
*Anggota Fraksi PDIP*



**Drs. H. Imran, M.Si.**  
*Anggota Fraksi Gerindra*

*Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadahnya.  
serta diampuni segala dosanya Amin*

# Swasembada Bawang Putih menjauh, Aturan Dilanggar Tanpa Ada Penegakan Hukum

Selama ini kita di DPR, hampir seluruh anggota Komisi IV sudah berupaya mengkritisi RIPH di kementerian pertanian sebagai kementerian teknis. Bila ini dihapuskan, maka upaya kita semua untuk mewujudkan swasembada produk hortikultura seperti bawang putih menjadi tidak jelas kedepannya

**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (30/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin sangat menyayangkan atas ketetapan kebijakan pembatasan impor bawang putih dan bawang bombay hingga 31/05 oleh kementerian Perdagangan.

Kebijakan ini berkonsekuensi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Surat Perizinan Impor (SPI) di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak akan diperlukan lagi.

"Selama ini kita di DPR, hampir seluruh anggota Komisi IV sudah berupaya mengkritisi RIPH di kementerian pertanian sebagai kementerian teknis. Bila ini dihapuskan, maka upaya kita semua untuk mewujudkan swasembada produk hortikultura seperti bawang putih menjadi tidak jelas kedepannya", urai Anggota Komisi IV ini.

Politisi PKS ini mengatakan, negara kita ini negara hukum. Situasi yang membuat panik terkait wabah

covid-19 ini lantas tidak boleh membuat pemerintah senaknya melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama menjadi lembaran negara.

UU Hortikultura No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura sangat tegas agar segala rekomendasi perizinan mesti dipenuhi yang berasal dari kementerian teknis. Syarat ini perlu dipenuhi agar impor dapat dilaksanakan sehingga ada simulasi yang aman dari segala aspek baik terkait kemanan kesehatan hingga perlindungan petani yang berhubungan dengan stok dan harga yang beredar di pasaran.

Berkaitan dengan pembebasan impor tanpa RIPH ini, Selain melabrak UU No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, juga sekaligus menyepelakan UU 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

"Hilang sudah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandiriannya dalam rangka meningkatkan taraf



kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik. Ketika para produk impor menguasai ketersediaan bawang putih secara bebas masuk, maka kerugian petani akan terdampak secara luas", jelas Akmal.

Data yang diterima Akmal per akhir maret ini, Kementan telah merilis RIPH tahun 2020 sebanyak 450 ribu ton bawang putih untuk 107 Importir. Ini artinya sudah sekitar 80 % kebutuhan nasional per tahun telah tercapai. Dilain pihak, Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang bombay, sudah terbit 227 ribu ton atau dua kali lipat kebutuhan nasional per tahun.

Pembebasan RIPH bawang putih dan bawang bombay ini

bila terus dilanjutkan, lanjut Legislator Sulsel II ini, maka pemerintah sendiri melalui kementerian perdagangan yang berlaku melanggar UU No.13 Tahun 2010 dan UU 19 Tahun 2013. Selama ini kementerian pertanian sudah sejalan dengan RIPH bawang putih dan bawang bombay melebihi kebutuhan nasional. Namun ada yang tidak baik pola komunikasi, koordinasi dan eksekusi di lapangan atas sehingga muncul kebijakan yang seolah pro rakyat, padahal dalam jangka menengah akan menghantam rakyat sendiri di kalangan petani.

Selengkapnya kunjungi [fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)

# Anggota FPKS: Ragukan Lockdown, Berbahaya Bagi Kondisi Ekonomi Negara

Isu Covid-19 membuat pembelian terhadap barang kebutuhan harian melampaui batas wajar. Akibat pembelian diluar batas kewajaran, membuat terjadinya kelangkaan barang di pasar. Hal itulah yang mengakibatkan harga barang melonjak tajam

**Dr. HERMANTO, S.E., M.M.**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (26/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Hermanto mengatakan wabah Covid-19 ini telah merubah perilaku konsumen atau consumer behavior change, belakangan ini.

Menurut Hermanto, isu Covid-19 membuat pembelian terhadap barang kebutuhan harian melampaui batas wajar.

"Akibat pembelian diluar batas kewajaran, membuat terjadinya kelangkaan barang di pasar. Hal itulah yang mengakibatkan harga barang melonjak tajam", ujar Hermanto yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPR RI ini.

Kondisi tersebut, lanjut Hermanto, terjadi di tengah ketidakjelasan kebijakan pemerintah dalam hal merespon isu Covid-19, dimana pemerintah dihadapkan pada dua pilihan antara melakukan lockdown atau tidak.

"Di tengah keraguan mengambil keputusan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian pasar, dimana berdampak pada dua sisi pasar yaitu: permintaan dan pasokan," pungkasnya.

Masyarakat, kata Hermanto, merasa khawatir dengan situasi saat ini,

sehingga terjadi pembelian dalam jumlah besar terhadap barang kebutuhan pokok.

"Pembelian barang dalam jumlah besar yang dilakukan masyarakat adalah untuk cadangan bila tiba-tiba terjadi lockdown, maka beramai-ramailah masyarakat pergi ke pasar dan mall untuk membeli dalam jumlah besar, sehingga terjadi kelangkaan", papar Anggota DPR RI asal Sumatera Barat ini.

Hermanto menambahkan, di tengah kelangkaan tersebut, kesempatan ini dimanfaatkan oleh pemasok untuk menaikkan harga.

"Pemasok pun khawatir, akan terjadi kelangkaan sumber bahan baku dan barang dagangan, sehingga tidak ketinggalan pula mereka ramai-ramai menaikkan harga diatas kewajaran", tutur Hermanto.

Jadi, kata Hermanto, benar-benar isu Covid-19 telah berdampak pada dua sisi pasar tersebut, bila tidak dikendalikan dengan baik, maka hal ini menjadi sumber meningkatnya



inflasi.

Pemerintah perlu mewaspadai lonjakan inflasi yang disebabkan dorongan permintaan dan biaya produksi terjadi dalam waktu bersamaan, secara agregat hal ini dapat mengancam memburuknya situasi ekonomi nasional," tegasnya.

Sisi lain pun, lanjut Hermanto, nilai kurs rupiah mengalami pelemahan sampai pada level nyaris Rp 17.000 per USD, akibatnya harga produk impor mengalami kenaikan," terangnya.

Juga, menurut Hermanto, belakang ini ada isu capital out

flow yang terjadi di capital market, akibatnya IHSG tertekan mengalami penurunan.

"Isu melonjaknya penumpang garuda Jakarta-Singapura belakangan ini diindikasikan sejumlah investor besar telah berpindah ke Singapura," paparnya.

Hermanto mengaggap, pemerintah jangan ragu untuk mengambil keputusan tentang lockdown Covid-19 di level nasional.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id Foto : Dpr.go.id

# DPR Minta Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Pemerintah Hadapi Covid-19

Saat ini kita perlu memperbaiki Sistem Logistik Nasional secara komprehensif sebagai bagian ketahanan nasional untuk menanggulangi dampak penyebaran wabah penyakit, termasuk didalamnya kebijakan tentang ketersediaan pangan yang beragam gizi seimbang dan aman

## H. JOHAN ROSIHAN, S.T.

Anggota Komisi IV DPR RI



"Sebetulnya kita punya instrument regulasi yang lumayan bisa digunakan untuk menanggulangi wabah Covid-19" ujarnya.

Dia mencontohkan dari sisi regulasi tentang Karantina Kesehatan maka pemerintah punya kewajiban atas perintah pasal 8 dari UU No. 6 tahun 2018.

"Setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup sehari-hari

lainnya selama Karantina", pungkasnya.

Maka artinya, kata Johan, pemerintah wajib menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam kebijakan tersebut.

Menurut Anggota FPKS DPR RI ini, untuk menghadapi wabah Covid-19, sebaiknya pemerintah mengimplementasikan instrument kebijakan ketahanan pangan yang focus pada zona wilayah yang terkena wabah.

"Pemerintah bisa melaku-

kan penguatan pasokan, distribusi dan cadangan pangan serta pengembangan diversifikasi dan industry pangan local dan meningkatkan keamanan dan mutu pangan segar," tandas Anggota DPR dari FPKS Dapil 1 NTB.

Johan memaparkan, saat ini kita perlu memperbaiki Sistem Logistik Nasional secara komprehensif sebagai bagian ketahanan nasional untuk menanggulangi dampak penyebaran wabah penyakit, termasuk didalamnya kebijakan tentang ketersediaan pangan yang beragam gizi seimbang dan aman.

"Saya menekankan kepada pemerintah, pentingnya implementasi penyelenggaraan ketahanan pangan dalam menghadapi wabah Covid-19 terutama di daerah rentan rawan pangan kronis yang terdiri dari 17 provinsi, 88 kabupaten dan 956 kecamatan," ujarnya.

Ketahanan pangan ini, lanjut Johan, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari



dampak wabah Covid-19 yang telah menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

"Disamping itu untuk meningkatkan rasio konsumsi normative per kapita terhadap ketersediaan pangan, mempermudah akses pangan dan kebijakan pemanfaatan pangan secara terpadu, termasuk menyiapkan segala ketersediaan sumberdaya yang diperlukan," ujar Johan.

Selanjutnya Johan berharap agar pemerintah segera menerapkan sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta melakukan langkah stabilisasi harga pangan terutama pada moment bulan puasa dan lebaran nanti.

"Sebagai contoh ketersediaan dan kebutuhan beras nasional, yang memiliki

stock awal tahun 2020 sebesar 4,51 juta ton serta kebutuhan beras nasional sebesar 111,58 kg/kap/th menurut data BPS, jadi dalam kondisi darurat wabah seperti ini maka pemerintah mesti menghitung peningkatan kebutuhan pangan agar tercipta ketahanan pangan secara komprehensif untuk mencegah semakin meluasnya dampak Covid-19 di Indonesia," tutup Johan.

# Dana Desa Untuk Tanggap Covid-19 Jangan Hanya Fokus untuk Sosialisasi

Dana desa untuk tanggap covid 19 jangan hanya fokus untuk sosialisasi, tetapi perlu diperhatikan kebutuhan masyarakat yg terdampak terutama kebutuhan keluarga pasien dalam pengawasan, atau isolasi.

## H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

Bangkinang (29/03) — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tentang dana tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Hal itu sebagai langkah kementerian dalam usaha pencegahan dan penanggulangan wabah Coronavirus Deseas (Covid-19).

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maizat Lc yang juga Anggota Komisi V yang merupakan mitra Kementdes PDT, mengapresiasi atas adanya SE nomor 8 tahun 2020 tersebut. SE itu menurutnya

regulasi yang tepat bagi Kepala Desa (Kades) untuk membantu warganya yang terdampak oleh wabah Covid-19 itu.

Namun sebagai catatan oleh Syahrul Aidi baik kepada Kades atau kementerian, dia meminta agar dana sosialisasi itu jangan habis untuk sosialisasi saja. Namun betul-betul untuk penanggulangan, baik secara medis atau pun kebutuhan ekonomi bagi keluarga yang terdampak.

"Kita mengingatkan kepada Kades agar dana itu betul-betul untuk penanggulangan, kurangi anggaran untuk sosialisasi. Fokuskan

anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak, atau untuk berobat" kata Syahrul Aidi saat dihubungi pada Ahad (29/03).

Ada dua kebutuhan yang diprioritaskan, yaitu penanggulangan pasien secara media, seperti untuk biaya pengobatan, operasional pasien terdampak ke rumah sakit atau Puskesmas Kedua adalah untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga bagi pasien yang telah tergolong Pasien Dalam Pengawasan (PDP).

"Pada umumnya pasien yang PDP, dia dan anggota keluarganya tak boleh keluar rumah. Otomatis mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka mereka harus dibantu dari Dana Desa untuk menjamin kebutuhan pokok hariannya," terang Syahrul Aidi lagi.

Menindaklanjuti edaran Menteri Desa dan PDT tersebut, Bupati Kampar telah mengeluarkan Surat dengan nomor 414.2/DPMDP/102 tahun 2020 yang meminta



Kades untuk menganggarkan dalam dana desa sebesar 100 juta rupiah untuk pencegahan Covid-19.

Dalam surat tersebut, disebut ada 9 item diluar sosialisasi yang dapat

dianggarkan oleh Kades dalam anggaran DD.

# Usaha Kecil Sulit Penuhi Cicilan, Pemerintah Harus Hadir di Masyarakat

Kita saat ini berpacu dengan waktu ya, agar secara bersamaan negara kita mampu membendung penyebaran wabah, sekaligus melakukan recovery dampak buruk akibat wabah. Dunia telah melihat kita tidak siap menghadapi wabah ini

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (29/03) — Sudah enam hari sejak Pemerintah mengumumkan akan menanggulangi penyebaran wabah, sekaligus melakukan recovery dampak buruk akibat wabah. Dunia telah melihat kita tidak siap menghadapi wabah ini. Tetapi demi untuk melindungi rakyat dalam segala hal termasuk kelangsungan hidup dan perekonomian, negara juga harus lebih siap atau negara turut hadir", ujar Anggota Komisi VI ini.

Menurut Legislator Sumatera Barat II ini, bahwa Fraksinya, FPKS mendengar keluhan dari masyarakat dimana mereka masih ditagih

bersamaan negara kita mampu membendung penyebaran wabah, sekaligus melakukan recovery dampak buruk akibat wabah. Dunia telah melihat kita tidak siap menghadapi wabah ini. Tetapi demi untuk melindungi rakyat dalam segala hal termasuk kelangsungan hidup dan perekonomian, negara juga harus lebih siap atau negara turut hadir", ujar Anggota Komisi VI ini.

Menurut Legislator Sumatera Barat II ini, bahwa Fraksinya, FPKS mendengar keluhan dari masyarakat dimana mereka masih ditagih

untuk pembayaran cicilan.

"Bahkan hingga Jumat, (27/03/2020) debt collector, pihak leasing masih menagih bahkan mengancam akan menarik motor pengemudi ojek online yang terlambat bayar cicilan. Saat ini bagi ojek online, motor digunakan sebagai alat untuk mencari nafkah," pungkasnya.

Nevi mengatakan, sebagaimana diketahui, hari selasa (24/03/2020) Presiden Jokowi sudah mengumumkan kebijakan relaksasi kredit, yaitu bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), nelayan, sopir taksi dan ojek online, diberikan kelonggaran pembayaran angsuran dan bunga, selama 1 tahun ke depan.

Masyarakat sudah mengetahui kebijakannya ini, tapi karena birokrasi terlalu lambat, dapat menimbulkan konflik di masyarakat, khususnya antara kreditur dan debitur.

"Masyarakat saat ini masih sangat percaya kepada pemerintah untuk memberi solusi bagi rakyatnya yang saat ini



sedang mengalami musibah nasional. Sangat disayangkan kepercayaan begitu besar ini semakin menipis bila pemerintah tidak mampu merealisasikan janjinya", katanya.

Politisi PKS ini juga menyayangkan keterlambatan pemerintah merespon persoalan-persoalan yang muncul akibat wabah COVID-19 ini, mulai dari penanganan korban, mitigasi resiko hingga jaring pengaman bagi mereka yang terdampak akibat penerapan kebijakan physical distancing.

Kebijakan relaksasi kredit diharapkan dapat berjalan dengan baik di lapangan, agar dapat membantu para pelaku

UMKM, ojek online, supir taksi dan nelayan dalam menjalankan usahanya di tengah-tengah wabah COVID-19 yang melanda sebagian wilayah Indonesia.

"Saya berharap, pemerintah mampu mengoptimalkan perusahaan plat merah memberi kontribusi nyata pada penanganan wabah ini. Saya Apresiasi pada Pertamina, karena melalui Program Kemitraannya telah menyalurkan bantuan permodalan hingga Maret 2020 sebesar Rp 33,7 miliar yang disalurkan kepada 402 UMKM yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia", tutup Nevi Zuairina.

# Anggota Fraksi PKS Tagih Janji Jokowi Tangguhkan Cicilan Rakyat Kecil

Kebijakan relaksasi kredit diharapkan dapat berjalan dengan baik di lapangan, agar dapat membantu para pelaku UMKM, ojek online, supir taksi dan nelayan dalam menjalankan usahanya di tengah-tengah wabah COVID-19 yang melanda sebagian wilayah Indonesia

## AMIN AK, M.M

Anggota Komisi VI DPR RI

Jakarta (28/03) — Sudah 5 hari sejak Pemerintah mengumumkan akan menangguhkan cicilan kredit usaha kecil, tukang ojek dan nelayan, namun hingga kini belum ada realisasinya.

Anggota Fraksi PKS Amin, Ak, mendengar keluhan dari masyarakat bahwa mereka masih ditagih untuk pembayaran cicilan.

"Bahkan hingga kemarin (Jumat, 27/03/2020) debt collector, pihak leasing masih menagih bahkan mengancam akan menarik motor pengemudi ojek online yang terlambat bayar cicilan," ungkap Amin.

Saat ini, lanjut Amin, bagi pengemudi ojek online, motor yang ditagih masih digunakan

sebagai alat untuk mencari nafkah, yang belakang mulai menurun akibat Covid-19.

Sebagaimana diketahui, selasa (24/03/2020) Presiden Jokowi mengumumkan kebijakan relaksasi kredit, yaitu bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM), nelayan, supir taksi dan ojek online, diberikan kelonggaran pembayaran angsuran dan bunga, selama 1 tahun ke depan.

"Masyarakat sudah mengetahui kebijakan ini, tapi karena birokrasi terlalu lambat, dapat menimbulkan konflik di masyarakat, khususnya antara kreditur dan debitur", pungkas Amin.

Anggota Komisi VI ini juga

menyayangkan keterlambatan pemerintah merespon persoalan-persoalan yang muncul akibat wabah COVID-19 ini, mulai dari penanganan korban, mitigasi resiko hingga jaring pengaman bagi mereka yang terdampak akibat penerapan kebijakan physical distancing ini.

"Kebijakan relaksasi kredit diharapkan dapat berjalan dengan baik di lapangan, agar dapat membantu para pelaku UMKM, ojek online, supir taksi dan nelayan dalam menjalankan usahanya di tengah-tengah wabah COVID-19 yang melanda sebagian wilayah Indonesia", tandas Anggota FPKS asal Jawa Timur ini.

Selain itu, Amin Ak. juga menyarankan pemerintah untuk mengoptimalkan perusahaan plat merah.

"Salah satu contoh yang sudah dilakukan adalah oleh perusahaan plat merah Pertamina, dimana melalui Program Kemitraannya telah menyalurkan bantuan permodalan hingga Maret 2020 sebesar Rp 33,7 miliar yang disalurkan kepada 402 UMKM yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia", tutup Amin.

Foto : dpr.go.id





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



**Dr. H. Mulyanto, M.Eng**  
Anggota Komisi VII DPR RI

## **PKS Minta PLN Siaga Selama Darurat Corona**

*Dalam situasi darurat seperti ini PKS berharap PLN tetap siaga melayani masyarakat. Usahakan pasokan listrik ke rumah-rumah warga tetap terjamin sehingga warga tetap nyaman menjalani berbagai aktifitas*

# PKS Minta PLN Siaga Selama Darurat Corona

Dalam situasi darurat seperti ini PKS berharap PLN tetap siaga melayani masyarakat. Usahakan pasokan listrik ke rumah-rumah warga tetap terjamin sehingga warga tetap nyaman menjalani berbagai aktifitas

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI

Tangerang Selatan (28/03) - Meski Presiden Joko Widodo belum mengambil kebijakan karantina wilayah (lockdown) namun beberapa Gubernur, Walikota dan Bupati berinisiatif menutup daerah masing-masing untuk menghindari meluasnya persebaran Virus Corona. Selama penutupan wilayah itu semua warga dilarang beraktifitas di luar rumah.

Untuk mendukung kegiatan warga selama berkegiatan di tempat masing-masing Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR-RI, Mulyanto, minta PT. PLN (Persero) menjamin ketersediaan listrik.

PLN diminta mengantisipasi berbagai gangguan dan kendala teknis di lapangan yang dapat terhentinya pasokan

listrik ke masyarakat.

Sebab jika pasokan listrik terganggu akan menyulitkan masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari.

"Dalam situasi darurat seperti ini PKS berharap PLN tetap siaga melayani masyarakat. Usahakan pasokan listrik ke rumah-rumah warga tetap terjamin sehingga warga tetap nyaman menjalani berbagai aktifitas," kata anggota Komisi VII DPR-RI, yang membidangi masalah Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Lingkungan Hidup.

Bahkan jika memungkinkan, tambah Mulyanto, PLN dapat memberi kelonggaran batas waktu pembayaran iuran listrik kepada para pelanggan. Sebab dalam kondisi seperti ini

setiap orang akan sulit berkegiatan seperti dalam kondisi normal.

"Di beberapa daerah pembayaran listrik masih dilakukan secara tunai di loket-loket penerimaan pembayaran iuran listrik. Tidak semua pelanggan PLN terbiasa membayarkan tagihan atau membeli token listrik menggunakan fasilitas internet, baik secara mobile ataupun melalui transfer di ATM," jelas Mulyanto.

Untuk itu PLN dinilai perlu menyusun berbagai skenario keuangan agar rencana tersebut dapat terwujud. Setidaknya PLN dapat mengikuti kebijakan instansi Pemerintah lain yang siap memberikan insentif kepada pelanggan selama masa darurat Corona.



# Bukhori Yakin Pendekatan Agama Adalah Alternatif Tangani Corona

Jika kita mencermati sejarah, tepatnya bagaimana respon yang ditunjukkan Nabi Muhammad kala itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam mendorong penganutnya menjadi pribadi yang rasional dan bertawakal.

## **KH. BUKHORI, Lc., M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (27/03) - Anggota DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf, menyatakan pendekatan agama adalah alternatif yang perlu ditempuh masyarakat Indonesia untuk mendukung upaya medis maupun upaya sosial (physical distancing) dalam merespon wabah Covid-19.

Anggota Komisi VIII ini mengaku langkah tersebut penting dan mendasak untuk diambil mengingat sampai hari ini angka kasus maupun kematian pasien tidak menunjukkan penurunan bahkan cenderung meningkat.

"Islam mengajarkan

penganutnya untuk melihat dan merespon masalah dengan mempertimbangkan pendekatan materiel dan nonmateriel. Dalam konteks penanganan Covid-19, pendekatan materiel tersebut berupa upaya medis dan sosial sedangkan pendekatan nonmateriel bisa berupa doa," ujar Bukhori di Jakarta, Jumat (27/03/2020).

Politisi PKS ini mencontohkan bagaimana upaya materiel yang dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi wabah berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari. Dalam

hadis tersebut, lanjutnya, Nabi Muhammad melarang siapapun untuk memasuki suatu wilayah ketika terjadi wabah. Begitupun sebaliknya, ketika wabah tersebut sedang terjadi di wilayah individu yang bersangkutan, maka ia dilarang meninggalkan wilayah tersebut. Dalam konteks kekinian langkah tersebut dikenal dengan istilah karantina atau isolasi.

Lebih lanjut, Bukhori juga mencontohkan bagaimana upaya nonmateriel yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui doa memohon perlindungan dari wabah penyakit. Dalam doa tersebut kita meminta kepada Allah untuk berlidung dari penyakit belang, gila, lepra, dan buruknya segala macam penyakit.

"Jika kita mencermati sejarah, tepatnya bagaimana respon yang ditunjukkan Nabi Muhammad kala itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Islam mendorong penganutnya menjadi pribadi yang rasional dan bertawakal. Artinya, selain



mengedepankan tindakan sosial maupun medis dalam merespon wabah ini, kita juga perlu mendorong tindakan spiritual melalui mobilisasi doa secara masif dalam format doa kebangsaan" pungkas Bukhori.

Politisi asal Jepara ini juga menyinggung agar doa kebangsaan ini dipelopori oleh para pemimpin bangsa mengingat Wakil Presiden Indonesia

adalah seorang ulama.

"Pada kondisi kritis ini ulama memainkan peran krusial untuk mendorong masyarakat melakukan tindakan amar ma'ruf dan nahi munkar seraya meminta kepada Allah agar dengan kuasa-Nya membawa bangsa ini berhasil melalui ujian wabah Covid-19," imbuh Bukhori mengakhiri.

# Imbas Covid-19, DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Pekerja

Tolong para pengusaha benar-benar melaksanakan edaran Kemenaker terkait langkah tanggap Covid-19. Pastikan bahwa pekerja yang tidak masuk bekerja karena terkatagori ODP, PDP atau positif Covid-19, tetap mendapat upah penuh

## Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Cirebon (28/03) – Dampak pandemi Covid-19 mengancam sektor industri. Berdasarkan perhitungan Apindo, PHK dari sektor perhotelan sudah 20-35 persen.

Menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) pasokan bahan baku dan suku cadang mesin industri garmen dari Tiongkok sudah berhenti sejak Januari.

Netty Prasetiyani, anggota DPR RI Fraksi PKS, meminta pemerintah dan pengusaha memerhatikan nasib pekerja.

"Para pekerja di sektor industri adalah pejuang yang

menggerakkan roda perekonomian. Tanpa mereka, industri akan ambruk. Saat Covid-19 mewabah, maka pemerintah dan pengusaha harus lebih ekstra memperhatikan nasib pekerja," ujarnya saat inspeksi ke RS Gunung Jati, Cirebon terkait penanganan Covid-19 sekaligus memberikan bantuan, Sabtu, (28/03).

Menurut Anggota Komisi IX ini, pekerja di sektor industri manufaktur termasuk kelompok rentan yang harus mendapatkan jaminan perlindungan.

"Industri yang masih bertahan dan pengusaha tidak

memungkinkan memberlakukan work from home, maka protokol pencegahan persebaran Covid-19 harus paripurna. Tidak boleh main-main terkait keselamatan pekerja," ujarnya.

Menurut Netty, wilayah industri padat karya seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, Karawang dan Cimahi termasuk wilayah zona merah Covid-19. Pada kesempatan tersebut Netty mengapresiasi himbauan tanggap Covid-19 yang diadarkan Kemenaker terhadap sektor Industri.

"Tolong para pengusaha benar-benar melaksanakan edaran Kemenaker terkait langkah tanggap Covid-19. Pastikan bahwa pekerja yang tidak masuk bekerja karena terkatagori ODP, PDP atau positif Covid-19, tetap mendapat upah penuh," ujar Netty.

"Bahkan, jika kondisi makin memburuk, saya menganjurkan sektor industri lakukan lockdown parsial. Lebih baik kita mundur selangkah daripada membawa kerugian yang lebih besar," imbuhnya.



Mengingat dampak ekonomi yang dirasakan pekerja akibat Covid-19, Netty meminta stimulus lain seperti keringanan pajak, penundaan tagihan listrik, penurunan suku bunga kredit pinjaman, insentif ekonomi (terutama UMKM) hingga bantuan sembako, diberikan kepada pekerja harian lepas dan juga masyarakat pra sejahtera.

Terkait kemungkinan terjadi PHK karena perusahaan merugi, Netty meminta agar pengusaha berlaku seadil-adilnya dalam menyelesaikan skema PHK.

"Ini masalah kemanusiaan yang tidak bisa dilihat dari perspektif untung rugi saja," tandas Netty.

Selain itu, Netty mengingatkan agar upaya penanganan

Covid-19 di kawasan industri harus menjadi concern bersama banyak pihak, mulai dari pengusaha, serikat buruh, pemda dan aparat keamanan.

"Makin luas tersebar, makin banyak korban jatuhannya maka makin besar juga dampak biaya yang harus ditanggung. Saya berharap pemerintah daerah dapat membentuk gugus tugas mandiri penanganan Covid-19 di lingkungan industri," lanjutnya.

Oleh karena itu, Netty mengajak sektor industri juga melaksanakan program sosialisasi, implementasi pencegahan dan penyebaran, pemetaan dampaknya terhadap industri, bahkan melakukan patroli agar tidak ada kerumunan yang berpotensi penyebaran Covid.

# Mufida: Selamatkan 270 juta Jiwa Rakyat Indonesia dari Covid-19

Pemerintah sebaiknya membuka opsi karantina sesuai Undang-Undang Karantina Kesehatan. Memang berat konsekwensi karantina ini, tapi kalo pemerintah melibatkan semua komponen bangsa bergotong royong, pasti bisa dilaksanakan

## Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (28/03) — Angka kasus Covid-19 setiap hari bertambah banyak dengan grafik yang menanjak tajam. Karena itu, pemerintah didesak segera bergerak lebih cepat dan tegas untuk menyelamatkan 270 juta jiwa rakyat Indonesia. Jangan sampai terlambat mengantisipasi untuk kesekian kalinya.

Desakan disampaikan anggota DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati dalam siaran persnya, Sabtu 28 Maret 2020. Menurut Mufida, pertambahan kasus corona (Covid-19) per hari sudah tembus 3 digit. Kasus positif

Jumat kemarin pun menembus angka 1000 dan angka kematian mendekati 100 orang.

"Pemerintah jangan sampai terkesan terlambat lagi dan tidak dipercaya publik. Komisi 9 sudah mengingatkan agar Pemerintah segera mengantisipasi masuknya Covid-19 sejak di China mulai mewabah dan negara-negara tetangga juga mulai terjangkit. Tapi ya sudahlah, kita sekarang mencari solusi ke depan saja," jelas Anggota Komisi IX ini.

Menurut Mufida, angka pertambahan kasus yang setiap hari dirilis pemerintah selalu

meningkat. Kecepatan konfirmasi hasil laboratorium pada orang-orang yang berstatus PDP atau suspect Covid-19 harus ditingkatkan. "Bahkan pada beberapa kasus, pasien keburu meninggal dunia sebelum didapatkan hasil tes laboratorium," ungkapnya dengan sedih

Mufida menegaskan, pemerintah harus lebih cepat lagi mencegah perluasan penyebaran Covid-19 dengan membatasi pergerakan orang.

"Jika pergerakan orang tidak dibatasi, dikhawatirkan virus ini akan menyebar ke berbagai pelosok di tanah air yang akan semakin menambah banyak jatuhnya korban. Paling ideal, berdasarkan masukan dari sejumlah ahli kesehatan, dilakukan karantina wilayah atau Tes PCR massal yang langsung bisa diketahui hasilnya," jelas Mufida.

Kita harus realistis bahwa kemampuan penanganan medis juga terbatas, terutama penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi para petugas medis



di garda terdepan serta ruangan isolasi, alkes dan obat-obatan.

Karena itu, Mufida mendorong pemerintah lebih serius mempertimbangkan opsi melakukan karantina, minimal untuk daerah pusat episentrum sebaran wabah seperti Jabodetabek.

"Pemerintah sebaiknya membuka opsi karantina sesuai Undang-Undang Karantina Kesehatan. Memang berat konsekwensi karantina ini, tapi kalo

pemerintah melibatkan semua komponen bangsa bergotong royong, pasti bisa dilaksanakan," tandas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Mufida menambahkan, desakan untuk melakukan karantina, minimal untuk Jabotabek, sebetulnya sudah banyak disuarakan dari berbagai pihak.

Selengkapnya di fraksi.pks.id

# Sakinah Apresiasi UN Dihapus Dampak Covid-19 yang Kian Meluas

“Dihapuskannya Ujian Nasional merupakan suatu langkah yang sangat bagus dimana kondisi masyarakat yang sedang menghadapi pandemik virus corona di tanah air”

**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag.**

Anggota Komisi X DPR RI

Palu (25/03) — Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri, yang merupakan Anggota Komisi X yang bermitra dengan Kementerian Pendidikan mengapresiasi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang penghapusan Ujian Nasional (UN) bagi pelajar SD, SMP dan SMA setelah sebelumnya menggelar rapat dengan Komisi X DPR RI.

“Dihapusnya Ujian Nasional merupakan suatu langkah yang sangat bagus dimana kondisi masyarakat yang sedang menghadapi pandemik virus corona di tanah

air”, ujar Sakinah di Komplek Al-Khairaat Palu, Rabu, (25/03/2020).

Penghapusan ujian nasional merupakan langkah strategis dan tepat dimasa darurat Covid-19 guna menjaga kesehatan guru, siswa dan warga sekolah serta upaya mencegah penyebaran covid-19 yang semakin tidak terkendalikan.

Penghapusan Ujian Nasional ini yang dilakukan mulai tahun 2020 atas dampak Covid-19 ini namun tidak menghapus Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Dalam pelaksanaan ujian sekolah dengan beberapa opsi pelaksanaannya yaitu ujian

sekolah dilaksanakan dengan daring, menggunakan skema kumulatif hasil nilai rapot dan penilaian menggunakan hasil karya ilmiah.

Namun demikian, Sakinah memperingatkan pemerintah agar segera mengeluarkan juknis dan juklak pelaksanaan ujian khususnya bagi daerah-daerah yang di luar pulau Jawa.

“Pemerintah harus segera mengambil langkah pelaksanaan ujian sekolah bagi daerah yang berada di luar pulau Jawa, apalagi daerah-daerah tertinggal yang tidak ada akses internet” pungkas politikus Partai Keadilan Sejahtera dari Sulawesi Tengah ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan penghapusan ujian nasional (UN) tahun 2020. Pasalnya situasi saat ini sedang tidak kondusif karena wabah virus Corona atau Covid-19 yang saat ini sudah ditemukan di 20 provinsi di Indonesia.



# Corona dan Kelompok Bersenjata Jadi Ancaman PON ke-20 di Papua

“KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata, red) dan corona, dua hal berlainan jenis, tapi semuanya mematikan dan cukup mengkhawatirkan bagi keberlangsungan PON

**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Jakarta (27/03) — Wakil Ketua Komisi X DPRRI, Abdul Fikri Faqih meminta Pemerintah untuk menjamin keamanan dan kelancaran bagi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-20 (XX) di Papua pada oktober tahun ini.

Hal tersebut menyusul adanya dua musibah yang tengah melanda, yakni wabah virus corona dan gangguan keamanan di distrik Tembaga-pura, Kabupaten Mimika.

“KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata, red) dan corona, dua hal berlainan jenis, tapi semuanya mematikan dan cukup mengkhawatirkan bagi keberlangsungan PON,” kata

Fikri saat dihubungi, Jumat 27 Maret 2020.

Fikri, yang juga menjabat Ketua Panitia Kerja (Panja) PON Komisi X DPR ini mengatakan, hambatan dalam pelaksanaan PON XX di Papua tidak hanya mencakup kendala infrastruktur atau pun hal teknis lainnya.

“Namun justru dari isu keamanan dalam penyelenggaraan even berskala besar ini,” ujarnya.

Kendala teknis, ujar Fikri, pelan-pelan bisa disiasati, tapi ancaman terbesar justru soal wabah Corona dan gangguan keamanan.

“Terkait Corona, meski

virus yang bernama lain COVID-19 ini, namun dikhawatirkan bisa mewabah karena interaksi banyak orang dari seluruh Indonesia yang hadir dalam pekan olahraga tersebut.

PON XX ini diperkirakan akan dihadiri wakil dari 34 provinsi sebanyak 36 ribu orang atlet dan ofisial,” jelas Politisi PKS ini.

Politisi asal Tegal, Jawa Tengah ini juga menyoroti sudah banyak event olahraga besar di beberapa negara yang harus dibatalkan karena pertimbangan wabah corona COVID-19.

“Pertimbangan antisipatif jadi lebih prioritas dibandingka kerugian dana yang sudah disiapkan sejak jauh hari,” kata Fikri.

Namun demikian, Fikri berharap wabah corona di tanah air segera mereda, menyusul berkurangnya aktifitas virus ini di negara asalnya, Tiongkok.

“Sehingga, pada waktunya PON nanti di Papua, wabah corona sudah benar-benar hilang,” harap dia.



**LAWAN  
VIRUS  
CORONA**



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag.,M.Si**  
Anggota Komisi XI DPR RI

**PKS Dorong Pemerintah  
berikan BLT dan Sediakan  
APD bagi Tenaga Medis**

Pemerintah dapat meminta industri untuk memproduksi masker, sabun dan hand sanitizer sehingga masyarakat dapat memperoleh barang-barang tersebut dengan mudah dan murah. Karena untuk saat sekarang, barang-barang tersebut menjadi kebutuhan masyarakat.

# PKS Dorong Pemerintah berikan BLT dan Sediakan APD bagi Tenaga Medis

Pemerintah dapat meminta industri untuk memproduksi masker, sabun dan hand sanitizer sehingga masyarakat dapat memperoleh barang-barang tersebut dengan mudah dan murah. Karena untuk saat sekarang, barang-barang tersebut menjadi kebutuhan masyarakat,"

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (24/03) — Legislator Partai Keadilan Sejahtera, Anis Byarwati mengatakan bahwa adanya pandemi Covid-19 secara global, membawa kondisi ekonomi yang tidak mudah bagi Indonesia.

"Yang terpenting adalah bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," tuturnya menegaskan.

Belum lama ini, pemerintah mengeluarkan stimulus kebijakan fiskal jilid 1 dan jilid 2. Namun faktanya, stimulus ini

tidak mampu mendorong daya beli masyarakat.

Padahal, pemerintah perlu mendorong daya beli masyarakat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di saat investasi menurun.

Menanggapi rencana menteri keuangan yang akan melakukan stimulus ekonomi dengan mengucurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Anis menyatakan sepakat.

"Salah satu cara efektif dalam meningkatkan daya beli saat perekonomian sulit adalah

memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mendorong konsumsi," ungkapnya di Jakarta, (24/03).

Anis menyarankan agar pemerintah menggunakan anggaran perjalanan dinas pemerintah. Sebab kegiatan dinas ke luar negeri atau antar daerah telah dihentikan sementara waktu. Berdasarkan data, anggaran perjalanan dinas dalam APBN 2020 mencapai Rp43 triliun. "Dana tersebut bisa dialihkan untuk program BLT," katanya.

Selain itu, Anis mendorong pemerintah agar bisa memberikan bantuan lain selain memberikan BLT. "Pemerintah juga bagus jika dapat menambah bantuan pangan nontunai," ungkapnya. Jumlah beras yang dapat diperoleh masyarakat bisa ditambah.

Anis juga mengatakan bahwa untuk menaikkan daya beli masyarakat, disamping memberikan BLT dan bantuan non pangan, pemerintah juga bisa menggratiskan listrik untuk peserta golongan 450 VA dan



900 VA selama beberapa bulan, dan membebaskan sementara pajak UMKM selama beberapa bulan.

Belum lama ini, pemerintah memutuskan memberikan subsidi pada bunga KUR. Bunga KUR saat ini telah turun dari 22 persen menjadi 12 persen. Namun, faktanya tidak ada daya beli masyarakat.

"Itulah sebabnya membebasan pajak untuk UMKM beberapa bulan ke depan, sangat diperlukan," ungkapnya.

Secara khusus, Anis menekankan bahwa dalam situasi darurat menghadapi pandemi Covid-19 perlu ada penambahan bantuan lain seperti sabun, alat kebersihan hingga pengadaan masker untuk masyarakat karena masker

menjadi langka di lapangan.

"Pemerintah dapat meminta industri untuk memproduksi masker, sabun dan hand sanitizer sehingga masyarakat dapat memperoleh barang-barang tersebut dengan mudah dan murah. Karena untuk saat sekarang, barang-barang tersebut menjadi kebutuhan masyarakat," pungkasnya.

Selain itu, Anis berpendapat akan sangat baik jika pemerintah meminta industri memproduksi APD bagi para dokter dan tenaga kesehatan.

"Pergadaan APD ini menjadi tugas pemerintah. Jika sampai Rumah Sakit meminta donasi kepada masyarakat, artinya negara tidak memenuhi tanggung jawabnya," pungkasnya.

# PKS Minta Pemerintah Realokasi Anggaran untuk Tangani Covid-19

Jika dirunut, belanja modal dari APBN memang tidak sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur baru. Namun lebih kepada biaya renovasi, perawatan maupun pembangunan gedung-gedung perkantoran di daerah. Jadi, keputusan ini harus segera dilakukan sehingga ketersediaan dana untuk penanganan bisa digunakan segera”

## H. ECKY AWAL MUCHARAM

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (26/03) — Dampak covid-19 terhadap Indonesia semakin hari semakin menjadi-jadi. Jumlah pasien positif covid-19 terus meningkat dan hanya sedikit dari mereka yang sembuh.

Data 25 Maret 2020 menunjukkan : jumlah kasus mencapai 790 kasus; 58 meninggal; dan 31 sembuh. Indonesia menjadi salah satu negara dengan dampak covid-19 yang cukup parah di dunia. Wakil Ketua Fraksi PKS

Ecky Awal Mucharam menjelaskan harus ada strategis khusus dari pemerintah untuk menangani situasi ini.

“Kita tidak bisa hanya memacu stimulus-stimulus yang tidak berdampak langsung pada penanganan covid-19,” ungkap Ecky

Ecky menjelaskan, stimulus moneter dan perbankan tidak akan berefek banyak saat ini, karena sumbernya dari sektor kesehatan.

Menurut anggota Komisi XI

DPR RI ini yang paling logis adalah mengarahkan seluruh kekuatan, terutama anggaran, untuk menangani covid-19 ini.

“Kami mendesak agar pemerintah merelokasi anggaran-anggaran di luar sektor kesehatan,” kata Ecky di Jakarta, Jumat (25/03).

“Kami melihat, bahwa pemerintah bisa merelokasi anggaran dari belanja modal dan belanja barang, dengan menunda beberapa pengadaan,” ujar Ecky.

Menurutnya jika dirunut, belanja modal dari APBN memang tidak sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur baru. Namun lebih kepada biaya renovasi, perawatan maupun pembangunan gedung-gedung perkantoran di daerah.

Menurut Legislator asal Cianjur ini pekerjaan-pekerjaan tersebut bisa ditunda dahulu, begitupun belanja barang.

“Jadi, keputusan ini harus segera dilakukan sehingga ketersediaan dana untuk penanganan bisa digunakan segera” tutup Ecky.



# Bisnis Melambat Akibat Covid-19, OJK Harus Tegas Dalam Stimulus UMKM

Beberapa langkah stimulus restrukturisasi kredit/ pembiayaan tersebut seperti jalan ditempat. Penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara seharusnya dapat benar-benar membantu jika benar-benar dieksekusi dan diawasi OJK,

## Ir.H.A. JUNAIDI AULY, M.M

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (28/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Junaidi Auly mengungkapkan dampak covid-19 telah memukul ekonomi Indonesia, bahkan hal tersebut terjadi bukan hanya di sektor formal tetapi juga di sektor informal.

Hal tersebut menurut Anggota Komisi XI ini tentu memengaruhi kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban angsuran/cicilan ke sektor keuangan. Disamping itu potensi kredit macet dikhawatirkan akan meningkat signifikan, untuk itu penting stimulus bagi pelaku usaha khususnya UMKM.

Junaidi Auly melanjutkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang baru-baru ini mengeluarkan stimulus sebagai respon terhadap covid-19. Namun masih terdapat Industri yang belum mengimplementasikan kebijakan tersebut.

“Beberapa langkah stimulus restrukturisasi kredit/pembiayaan tersebut seperti jalan ditempat. Penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau

konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara seharusnya dapat benar-benar membantu jika benar-benar dieksekusi dan diawasi OJK,” pungkas Junaidi.

Politisi asal Lampung ini mengkritisi pengawasan OJK dalam rangka mendukung optimalisasi stimulus.

“Saya berharap OJK harus benar-benar mengawal implementasi stimulus tersebut di lapangan, sehingga kondisi pelaku usaha saat ini bisa terbantu”, tutup Junaidi.





الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا

إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Atas nama keluarga besar Fraksi PKS DPR RI  
Kami Turut berduka atas berpulangnya  
ke rahmatullah ibunda Presiden Joko Widodo

## Ibu Sudjiatmi Notomiharjo

Wafat pada Rabu 25 Maret 2020 di Kota Solo.  
Pukul 16.45 WIB dalam usia 77 tahun.

Semoga Allah SWT menerima seluruh  
amal ibadahnya. serta diampuni  
segala dosanya Amin



Dr. H. Jazuli Juwaini, MA  
Ketua Fraksi PKS DPR RI





# Fraksi PKS DPR Sampaikan Belasungkawa Atas Meninggalnya Ibunda Jokowi



Semoga beliau tabah dan kita semua mendoakan beliau agar tetap tegar dan dapat kembali menjalankan tugas kenegaraan memimpin bangsa ini keluar dari masa-masa sulit seperti saat ini. Amiin ya robbal aalamiin

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (25/3) - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyampaikan belasungkawa dan duka cita mendalam atas meninggalnya ibunda tercinta Presiden Joko Widodo pada hari ini Rabu, 25 Maret 2020.

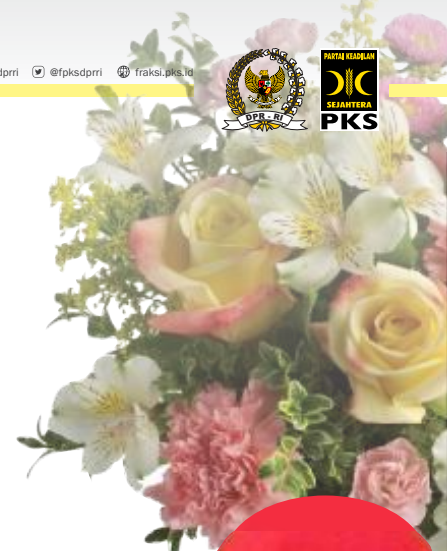
"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atas nama pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPR RI kami ucapkan turut berduka cita kepada Presiden Jokowi dan keluarga besar. Semoga ibunda husnul khotimah,

dilapangkan kuburnya, dan diterima di sisi Allah SWT," ungkap Jazuli.

Ketua Fraksi PKS juga berdoa semoga Pak Jokowi dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Sungguh berat memang melepas kepergian seorang ibu yang sangat mencintai dan dicintai Pak Jokowi.

"Semoga beliau tabah dan kita semua mendoakan beliau agar

tetap tegar dan dapat kembali menjalankan tugas kenegaraan memimpin bangsa ini keluar dari masa-masa sulit seperti saat ini. Amiin ya robbal aalamiin," pungkasi Jazuli.



# Tak Hanya Bantu Penanggulangan Covid-19, Alifuddin Turun Bersama Relawan

Komisi IX juga sudah mulai rapat koordinasi kembali dengan pak menkes, kemarin kami via online, dan juga sudah kami sampaikan masukan yang kami dapat dan rasakan oleh masyarakat dan tenaga medis di Pontianak

## H. ALIFUDDIN, S.E.,M.M.

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Kalimantan Barat I

Pontianak (26/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Alifuddin, turun langsung bersama Relawan PKS Kalbar yang tergabung dalam tim penanggulangan wabah virus Corona melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan ke rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya.

Kali ini kegiatan penyemprotan disinfektan dilakukan di Masjid Ilham, Kota Baru, Pontianak, Kamis

(26/3/2020). Alifuddin bersama tim Relawan yang berjumlah 10 orang turun sejak pagi.

"Alhamdulillah kali ini kami bisa ikut bersama tim relawan untuk melakukan penyemprotan disinfektan ke masjid Ilham, insya Allah ini juga sudah izin kepengurus dan tim langsung bergerak," ujarnya.

Alifuddin juga mengatakan, kemarin sudah ada rapat bersama Menkes, dr. Terawan melalui jaringan online

terkait kondisi terkini.

"Komisi IX juga sudah mulai rapat koordinasi kembali dengan pak menkes, kemarin kami via online, dan juga sudah kami sampaikan masukan yang kami dapat dan rasakan oleh masyarakat dan tenaga medis di Pontianak," tambahnya.

Alifuddin juga mengajak kepada seluruh warga untuk tetap di rumah dan selalu menjaga kesehatan.



# Kongkrit! Realisasikan Pemotongan Gaji Anggota DPR, PKS Bantu APD Melalui IDI

Kepada Pemerintah kita tetap mendesak agar distribusi APD yang telah didaatkan bisa dilakukan dengan cepat dan merata sesuai kebutuhan tenaga medis di berbagai rumah sakit. Dan untuk memenuhi kekurangan, Pemerintah harus lebih sigap dan cepat menggalang bantuan dari sektor swasta dan masyarakat luas

## Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (26) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) HM Sohibul Iman dan Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menyerahkan bantuan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga medis yang berjuang menyelamatkan rakyat melalui Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Turut mendampingi Wakil Ketua Fraksi Adang Dorjotun dan Ketua Genta PKS Naharus Surur. Bantuan PKS diserahkan dan diterima langsung oleh Ketua Umum IDI Dr. Daeng M Faqih, SH, MH di Kantor Pusat IDI Jakarta, Kamis 26 Maret 2020.

Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan

bahwa bantuan ini adalah bentuk kongkrit kepedulian PKS untuk memenuhi kebutuhan APD yang dikeluarkan para dokter dan tenaga medis di berbagai rumah sakit di tengah ancaman Covid-19. Bantuan ini juga bentuk solidaritas dan dukungan moril kepada rekan-rekan tenaga medis yang berjuang di garda depan menghadapi Covid-19. Selain melalui IDI, bantuan APD dari PKS juga disalurkan melalui Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

"Tidak ingin berpolemik panjang soal kelambatan

pemenuhan APD bagi Pahlawan Medis, PKS berinisiatif membantu dalam batas kemampuan dan kewenangan. Fraksi PKS secara nasional telah menyepakati pemotongan gaji dewan Bulan Maret untuk merealisasikan bantuan tersebut. Bahkan sebelumnya Fraksi juga telah menginstruksikan gerakan pembagian masker dan disinfektan gratis bagi rumah-rumah ibadah," ungkap Jazuli.

Menurut Jazuli mungkin bantuan ini memang tidak seberapa dibandingkan kebutuhannya. Oleh karena itu PKS mengajak seluruh komponen bangsa bahu membahu dan tergerak untuk menggalang solidaritas bantuan dan kepedulian. Tidak ada waktu lagi kita saling menyalahkan, karena kita berpacu dengan virus yang menyebar cepat dan mengancam nyawa rakyat dan tenaga medis.

"Seluruh anggota PKS sudah bergerak mulai pejabat publik, anggota legislatif, struktur pusat-daerah hingga kader di akar rumput untuk membantu semaksimal usaha dan kemampuan dengan menggalang donasi, pengadaan APD gratis, penyemprotan disinfek-



tan gratis, hingga bantuan sembarako bagi kelompok masyarakat miskin yang terdampak parah. Semua dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat," tegas Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini menekankan kepada seluruh adeg, struktur dan kader PKS menjadi bagian yang bisa mensosialisasikan kepada warga untuk membangun kesadaran tentang perlunya menjaga kesehatan, kebersihan, menjaga jarak (social distancing) bahkan karantina mandiri di rumah masing-masing. Bagi yang harus keluar karena pekerjaan tetap

harus memperhatikan arahan-arahan paramedis.

Anggota DPR Dapil Banten ini berharap bantuan yang diberikan—bersama-sama dengan donasi yang diberikan berbagai pihak dan komponen bangsa lainnya—bisa membantu memenuhi kekurangan atau kelangkaan APD bagi Pahlawan Medis sehingga mereka bisa fokus berjuang menyelamatkan setiap nyawa rakyat Indonesia dan dirinya sendiri terlindungi dengan APD yang cukup.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Aleg PKS Bagikan Paket Penanggulangan Persebaran Virus Corona

Selain pemberian paket bantuan, kami juga mengimbau masyarakat untuk membatasi diri keluar rumah. Jika tidak ada keperluan yang penting dan mendesak sebaiknya masyarakat diam di rumah untuk menghindari terkontaminasi virus yang berbahaya itu

## Dr. H. Mulyanto, M.Eng

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten III

Tangerang Selatan (25/03) — Dalam rangka menanggulangi persebaran virus corona anggota FPKS DPR RI, Mulyanto, membagikan paket penanggulangan persebaran virus corona.

Paket berisi 1 unit plasma ozon untuk produksi disinfektan, 10 unit penyemprot cairan disinfektan, 10 paket disinfektan dan 1.000 handsanitizer disalurkan melalui Pengurus DPD PKS Kota Tangerang Selatan, Selasa (24/03/2020).

Paket bantuan diserahkan langsung oleh Mulyanto kepada Sekretaris DPD PKS Tangerang

Selatan, Joko Ari dan disaksikan oleh ketua-ketua DPC PKS se-Kota Tangerang Selatan.

Selanjutnya paket akan digunakan di masing-masing kecamatan untuk membersihkan lingkungan dari persebaran virus corona.

"Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan, dimana Kota Tangerang Selatan ditetapkan sebagai zona merah persebaran virus corona maka sudah selayaknya kita bekerjasama mengatasi masalah ini.

Masyarakat harus berperan aktif membantu petugas

mengurangi resiko persebaran virus corona di lingkungan masing-masing.

"Untuk menunjang kegiatan itu maka saya coba membantu menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Semoga bantuan kecil ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Mulyanto.

Mulyanto menambahkan bantuan persebaran virus corona tidak hanya dilakukan di Tangerang Selatan. Bantuan juga diberikan ke Kota dan Kabupaten Tangerang.

Mulyanto mengupayakan pendistribusian bantuan dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Mengingat persebaran virus corona di lingkungan masyarakat juga begitu cepat.

"Selain pemberian paket bantuan, kami juga mengimbau masyarakat untuk membatasi diri keluar rumah. Jika tidak ada keperluan yang penting dan mendesak sebaiknya masyarakat diam di rumah untuk menghindari terkontaminasi virus yang berbahaya itu," imbaunya.



# Waspada Covid-19 di Sukabumi, Aleg PKS Pastikan Persediaan Bahan Pangan di Gudang Bulog

Persediaan beras untuk Kota dan Kab. Sukabumi selama menghadapi pandemi covid-19 ini, tersedia sampai akhir tahun nanti. Tadi berdasarkan informasi dari pihak Bulog, persediaan bahan pangan terutama beras, itu aman. Sehingga masyarakat tidak perlu panic buying dalam menghadapi virus corona ini.

## drh. H. SLAMET

Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Jawa Barat IV

Sukabumi (25/03) — Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet, mengecek persediaan bahan pangan pokok, terutama beras, di Komplek Pergudangan Bulog Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, Selasa (24/03/2020).

Berdasarkan pengecekan tersebut, Slamet memastikan bahwa persediaan beras untuk

Kota dan Kabupaten Sukabumi selama menghadapi pandemi covid-19 ini, tersedia sampai akhir tahun nanti.

"Tadi berdasarkan informasi dari pihak Bulog, persediaan bahan pangan terutama beras, itu aman. Sehingga masyarakat tidak perlu panic buying dalam menghadapi virus corona ini," kata Slamet.

Akan tetapi, Slamet tetap

mengingatkan Pemerintah Indonesia agar menjaga ketersediaan bahan pangan secara nasional selama pandemi covid-19 berlangsung dan saat akan menghadapi opsi lockdown. Pasalnya, ketersediaan bahan pangan yang cukup akan meminimalisasi lonjakan harga di pasaran.

Slamet menuturkan, seluruh dunia sekarang sedang dilanda pandemi covid-19, tak terkecuali Indonesia. Realitas di Indonesia adalah terjadinya transmisi eskalatif yang meningkatkan jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PD), suspect dan korban akibat covid-19 ini di berbagai daerah.

"Sangat mungkin penyebaran ini belum melewati masa puncaknya. Oleh karenanya ada kemungkinan opsi lockdown (karantina wilayah) akan diterapkan oleh pemerintah, setelah opsi social distancing (penjagaan jarak sosial) dianggap tidak berjalan efektif karena



masih banyaknya masyarakat yang melanggar. Ketika opsi lockdown diterapkan dan bersamaan dengan itu opsi social distancing diterapkan dengan kekuatan militer, maka praktis pergerakan orang dan barang akan mengalami kendala," jelas Slamet.

Selain itu, lanjut Slamet, pemerintah khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus sudah melakukan kajian dan menetapkan jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap daerah dan bagaimana cara distribusi-

nya ke rumah-rumah penduduk dalam situasi seperti ini.

Sebagai upaya mengatasi situasi khusus seperti ini, pemerintah juga perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang bertugas memastikan kecukupan stok pangan di sentra-sentra gudang pangan di tiap daerah dan bertugas mendistribusikannya ke rumah-rumah. Hal itu perlu dilakukan bila penerapan social distancing dan lockdown diterapkan dengan ketat oleh pemerintah untuk menghentikan eskalasi transmisi covid-19 ini," tukasnya.

# Cegah Wabah Corona di Palu Sakinah Lakukan Penyemprotan Disinfektan

“Mudah-mudahan dengan dilakukan penyemprotan disinfektan daerah kita steril kembali, masyarakat dijaga Allah dan tidak terpapar virus corona”

## Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sulteng

Palu (24/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS dapil Sulawesi Tengah Sakinah Aljufri, bersama Ketua DPW PKS Sulawesi Tengah Mohammad Wahyudin, ikut serta dalam aksi peduli pencegahan Covid-19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan di rumah ibadah dan rumah tokoh agama di Palu Minggu, (22/03/2020).

Keselamatan masyarakat agar tidak terjangkit virus corona menjadi hal yang sangat penting saat ini, ditengah wabah Covid-19 semakin menyebar ke berbagai daerah di tanah air.

Sakinah yang turut terjun

langsung dalam penyemprotan ini mengatakan bahwa penyemprotan disinfektan sangat penting dilakukan, selain menjaga masyarakat juga upaya mencegah penularan virus terhadap tokoh agama.

“Selain masjid, rumah tokoh agama juga penting dilakukan penyemprotan karena tokoh agama banyak dan sering menerima kunjungan masyarakat dari berbagai daerah dan hampir setiap hari, tanpa sadar ini rentan terpapar virus. Untuk itu saya sampaikan agar selain masjid, rumah tokoh agama penting juga ditargetkan penyemprotan disinfektan”,

ungkap Sakinah.

Selain penyemprotan Sakinah juga menghimbau agar masyarakat bersatu melawan corona dengan menerapkan pola hidup bersih dan Sehat (PHBS) sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan yaitu dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, berolahraga dan istirahat yang cukup.

Sakinah berharap dengan penyemprotan disinfektan yang dilakukannya bersama jajaran pengurus DPW PKS Sulawesi Tengah dan masyarakat, daerahnya steril dan bebas dari virus corona. Sakinah pun mendoakan agar masyarakat Sulawesi Tengah tidak terpapar virus corona.

“Mudah-mudahan dengan dilakukan penyemprotan disinfektan daerah kita steril kembali, masyarakat dijaga Allah dan tidak terpapar virus corona”. Pungkas Sakinah.



# Hadapi Covid-19, Syahrul Aidi Minta Rumah Sakit Tingkatkan Fasilitas Kesehatan Pendukung



Pekanbaru (23/03) – Rumah sakit di Riau dinilai masih terbatas kepeduliannya untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Fasilitas yang disediakan dianggap tidak layak jika perkembangan virus ini makin membahayakan.

Hal itu disampaikan oleh Syahrul Aidi saat dihubungi pada Senin (23/03/2020) pagi saat menanggapi hasil pertemuan dia dengan Gubernur Riau pada Sabtu (21/03/2020) malam yang lalu.

Dari hasil pertemuan itu, kita mendapatkan informasi

bahwa rumah sakit di Riau masih kurang peduli terhadap penanganan virus Corona ini. Ada yang hanya menyediakan satu kamar, dua kamar. Rata-rata seperti itu. Dan ini dianggap sangat minim jika kasus ini makin membahayakan le depannya" ujar Syahrul Aidi.

Untuk itu, katanya, dia mengingatkan agar semua rumah sakit menyiapkan fasilitas kesehatan. Baik itu ruangan, obat-obatan, pakaian, sterilisasi hingga tenaga medis. Dia tak ingin rumah sakit setengah-setengah.

Syahrul Aidi juga mengucapkan terima kasih kepada pengelola Rumah Sakit Awal Bross Pekanbaru yang telah menyediakan satu lantai khusus di salah satu cabang rumah sakitnya di Pekanbaru untuk penanganannya.

"Saat pertemuan tersebut saya mengajak dr. Arfan (pengelola RS Awal Bross) bertemu dengan Gubri. Saat saya hubungi, dia menyatakan sangat peduli atas penanganan

Dari hasil pertemuan itu, kita mendapatkan informasi bahwa rumah sakit di Riau masih kurang peduli terhadap penanganan virus Corona ini. Ada yang hanya menyediakan satu kamar, dua kamar. Rata-rata seperti itu. Dan ini dianggap sangat minim jika kasus ini makin membahayakan le depannya

## H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A

Anggota Komisi V DPR RI Dapil Riau

virus ini. Maka saya ajak langsung bertemu Gubernur Riau. Alhamdulillah dia langsung menyatakan komitmen dia tersebut di hadapan Gubernur Riau." tutur anak pesantren ini.

# Saat Reses, Hermanto Didesak Petani Agar Perbaiki Irigasi yang Bocor

Baik, saya ikut partisipasi. Perbaiki irigasi segera dilaksanakan agar manfaatnya juga bisa segera dirasakan

**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI dapil Sumbar

Padang (23/03) — Anggota DPR dari Dapil Sumbar 1 Hermanto, dalam perjalanan resesnya di dapil menyampaikan diri berolahraga melintasi areal persawahan di Kelurahan Koto Pulaui, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.

Pada perjalanan tersebut Hermanto bertemu dengan Darmin, petani setempat anggota Kelompok Tani (Poktan) Melati.

Pada kesempatan tersebut Darmin mengeluhkan, sudah sekitar 1,5 bulan irigasi tersier yang mengalir sawah Poktan Melati bocor sehingga air tidak bisa secara optimal mengalir sawah kelompoknya. Hermanto

didesak untuk melihat langsung lokasi bocornya irigasi tersebut.

Kalau bocornya seperti ini bisa dilaporkan ke Dinas Pertanian. Pasti akan diperbaiki", ujar Hermanto.

Darmin kemudian menanggapi pernyataan Anggota DPR RI Fraksi PKS tersebut.

"Kalau kami lapor ke dinas, prosesnya lama. Harus buat proposal dulu. Lalu menunggu dananya dianggarkan dan seterusnya," imbuh Darmin.

Menurut Darmin, untuk menyelesaikan dengan cepat masalah irigasi bocor ini petani patungan dan sudah terkumpul

Rp. 1 juta.

Menanggapi keluhan warga, Hermanto langsung menyampaikan keinginannya untuk berkontribusi dalam membantu meringankan beban warga.

"Baik, saya ikut partisipasi. Perbaiki irigasi segera dilaksanakan agar manfaatnya juga bisa segera dirasakan", papar Hermanto saat menyerahkan bantuan dana kepada petani di tengah sawah yang disaksikan Ketua RT setempat.



# Cirebon Masuk Zona Merah Covid 19, Netty Lakukan Inspeksi Lapangan



Cirebon (29/03) — Wakil Ketua Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengaku prihatin dengan kondisi Kota Cirebon yang masuk dalam zona merah Covid-19, saat mendarang RSUD Waled Cirebon, Jawa Barat.

"Sudah 1155 orang dinyatakan positif Covid-19 dan 119 diantaranya berada di Jawa Barat. Bahkan Cirebon sudah masuk zona merah. Langkah penanganan harus ekstra serius dan melibatkan semua

kalangan," kata Netty Prasetiyani, Sabtu (28/03/2020).

RSUD Waled berdasarkan informasi Jibur Gugus Tugas Covid-19 Cirebon, saat ini merawat 11 orang katagori PDI.

Anggota Komisi IX yang datang didampingi suaminya, Ahmad Heryawan, Gubernur Jabar (2008-2018), memberikan apresiasi atas dedikasi jajaran rumah sakit dalam berjibaku hadapi pandemi Covid-19.

"Kedua, saya ingin memberikan dukungan material sebagai bentuk kepedulian sekaligus suntikan semangat kepada tenaga kesehatan, dan ketiga saya perlu mengecek kesiapan dan kendala yang dihadapi rumah sakit dalam menjalankan tugas,"ujarnya. Saat ini, kata Netty, saatnya setiap orang berpikir memberikan kontribusi pada negara.

"Lakukan yang kita tahu

dan kita bisa untuk membendung persebaran Covid-19. Dan sesuai arahan pimpinan partai, kader PKS harus terus hadir memberikan khidmat pada rakyat. Tidak pandang musim, apakah musim pemilu, mudik atau bencana wabah. Kader pun diminta penggalangan dana," lanjutnya.

Selain mengunjungi RSUD Waled, Netty juga mendarang RSUD Gunung Jati, Kota Cirebon. Sedangkan bantuan material juga diberikan pada RSUD Arjawinangun, RSUD Indramayu dan struktur DPD PKS Kokab Cirebon dan Indramayu.

"Saya berharap struktur dan kader PKS di Kokab Cirebon dan Indramayu sigap membantu pemerintah dalam memberikan sosialisasi pada masyarakat tentang bagaimana melawan Covid-19.

"Melakukan aksi langsung di lapangan berupa penyemprotan disinfektan tempat-tempat publik dan memberikan bantuan masker dan APD yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan", tambahnya.

Tak lupa Netty kembali mengingatkan masyarakat Cirebon dan Indramayu untuk

Sudah 1155 orang dinyatakan positif Covid-19 dan 119 diantaranya berada di Jawa Barat. Bahkan Cirebon sudah masuk zona merah. Langkah penanganan harus ekstra serius dan melibatkan semua kalangan

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Jabar IX

menjaga kesehatan dan keawasan.

"Stay at home, utamakan physical distancing, dan ikuti protokol kesehatan dan keselamatan covid-19, seperti biasanya cuci tangan dengan air mengalir, kenakan masker, dan tidak berkerumun. Gunakan momen stay at home untuk menguatkan ikatan keluarga dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa," tutup Netty.

# Syaikhu Semangati Dokter, Paramedis dan Staf RSUD Banyuasih

Meskipun belum ada yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19, pihak rumah sakit sudah melakukan beberapa langkah antara lain menambah dua ruang isolasi, memberikan batas kursi antrian pasien dengan lakban warna merah pada kursi agar terjadi jarak aman di antara pasien yang mengantri di poli dan juga dua tenda peleton yang disiagakan di halaman RSUD untuk mengantisipasi antrian yang panjang

## H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VII

Purwakarta (30/03) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu, pada Sabtu (28/03/2020) melakukan kunjungan ke RSUD Banyuasih kabupaten Purwakarta.

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat perkembangan wahab Covid-19 di kabupaten Purwakarta sekaligus melihat kesiapan RSUD Banyuasih menghadapi

wabah tersebut.

Dalam kunjungannya Syaikhu menyemangati jajaran RSUD yang terdiri dari dokter, paramedis, dan seluruh staf RSUD untuk terus bekerja secara optimal dan profesional dalam melayani seluruh pasien yang ada.

"Meskipun belum ada yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19, pihak rumah sakit

sudah melakukan beberapa langkah antara lain menambah dua ruang isolasi, memberikan batas kursi antrian pasien dengan lakban warna merah pada kursi agar terjadi jarak aman di antara pasien yang mengantri di poli dan juga dua tenda peleton yang disiagakan di halaman RSUD untuk mengantisipasi antrian yang panjang", terang Syaikhu.

Ihah RSUD, lanjut Syaikhu, mengeluhkan minimnya alat pelindung diri (APD) dan lambatnya hasil pemeriksaan swab terhadap pasien.

"Mereka pun menerima keluhan dari masyarakat agar pemerintah kabupaten menyiapkan lahan khusus untuk memulusarkan jenazah yang positif terkena covid-19", pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Kabupaten Purwakarta, Karawang dan Bekasi itu melihat beberapa tempat penyimpanan botol hand sanitizer yang kosong,



tidak ada botol dan isinya.

"Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, saya memberikan bantuan 5 jerigen hand sanitizer kepada pihak RSUD Banyuasih dan meminta agar tempat-tempat hand sanitizer diisi botol dan hand sanitizernya," terang Syaikhu.

Syaikhu yang didampingi dua orang staf ahli, BS Wibowo dan Budiwanto, dan seorang

anggota DPRD kabupaten Purwakarta, Arief Kurniawan dari Fraksi PKS dan Ketua DPD PKS kabupaten Purwakarta, Hasan Sobari, siap menyampaikan keluhan yang disampaikan RSUD kepada pihak yang berwenang dan memperjuangkan agar ada perbaikan dalam pelayanan ke depan

# Aleg PKS: Karantina Tangerang Raya Sekarang!

Pemerintah segera menghitung dengan cermat efek ekonomi dari tindakan karantina wilayah ini, terutama bagi pekerja tidak tetap dan UMKM serta merancang dukungan afirmatifnya. Karena sesuai dengan UU Kekarantina Kesehatan tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan dukungan logistik dan jaminan hidup bagi masyarakat yang mengalami tindakan karantina. Ini adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya.

## Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten III

Langkah ini perlu diambil, karena Per tanggal 26 Maret 2020, melalui situs covid19.kemkes.go.id, Pemerintah menyebut Tangerang Selatan sudah menjadi wilayah "transmisi lokal" bagi penyebaran virus corona, menyusul Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Suatu wilayah berstatus "transmisi lokal", apabila terjadi penyebaran virus dari orang ke

orang dalam lokalitas yang sama dan bukan tertular saat berada di daerah lain. Penduduk yang tinggal dalam daerah berstatus "transmisi lokal" sangat berpotensi menjadi "orang dalam pengawasan" (ODP). Sehingga penanganan penyebaran virus dalam daerah ini akan menjadi lebih sulit.

Itu sebabnya orang dari daerah lain tidak boleh masuk ke daerah ini. Begitu juga sebaliknya, warga dari daerah "transmisi lokal" tidak boleh ke

luar daerah, agar tidak menularkan warga di daerah lain.

"Hal ini merupakan amanah UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan. Tindakan mengkarantina suatu wilayah merupakan bukti nyata keseriusan Pemerintah menanggulangi persebaran wabah Covid-19 ini," ujar Mulyanto.

Tempat keramaian bukan sekedar dibatasi atau dihimbau untuk tidak beroperasi tetapi harus ditutup untuk sementara waktu, sampai wabah ini mereda," ujar Mulyanto.

Mulyanto minta

Pemerintah segera menghitung dengan cermat efek ekonomi dari tindakan karantina wilayah ini, terutama bagi pekerja tidak tetap dan UMKM serta merancang dukungan afirmatifnya. Karena sesuai dengan UU Kekarantina Kesehatan tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan dukungan logistik dan jaminan hidup bagi masyarakat yang mengalami tindakan karantina. Ini adalah kewajiban pemerintah untuk melindungi warganya.

Banten, dalam hal ini Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang adalah daerah yang



berbatasan dengan DKI Jakarta yang merupakan episentrum penyebaran virus corona.

"Jadi perlu mendapat perhatian yang khusus juga," jelas Mulyanto di sela acara "Aksi Khidmat PKS" dalam bentuk penyerahan 31 unit sprayer desinfektan di Kantor Dewan Pengurus Daerah PKS

Kota Tangerang Selatan, Jumat (27/3).

# Aleg PKS Bagikan Masker dan Hand Sanitizer pada Petugas Sampah

Yang kami lakukan adalah berpartisipasi aktif memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia dengan membagikan APD kepada Petugas Pengambil Sampah Organik yang terpaksa beraktifitas

**Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jabar VI

Depok (28/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Nur Azizah Tahmid, dalam perpanjangan masa reses persidangan kedua, memberikan bantuan APD kepada para Petugas Sampah Kota Depok.

Dalam aksinya, Anggota Komisi VIII ini ditemani Ketua Komisi IV DPRD Prov. Jabar Imam Budi Hartono dan segenap rombongan membagikan masker dan hand sanitizer, Jum'at (27/03/2020).

"Yang kami lakukan adalah berpartisipasi aktif memutus penyebaran Covid-19 di Indonesia dengan membagikan APD kepada Petugas Pengambil

Sampah Organik yang terpaksa beraktifitas," ungkapnya.

Nur Azizah juga menghimbau agar masyarakat senantiasa memproteksi diri dengan menjaga hidup sehat.

"Menggunakan masker saat beraktifitas, cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer serta menjaga sanitasi di sekitar rumah," pungkasnya.

Nur Azizah menambahkan setelah membagikan APD para petugas sampah mengaku sangat bersyukur dan berterimakasih, karena dipasaran sulit mendapatkannya.

"Masker & hand sanitizer

kalaupun di jual dipasaran biasanya harganya agak mahal," imbuh wanita berkacamata ini.

Sebelumnya perlu diketahui bahwa masker dan hand sanitizer yang dibagikan merupakan buatan warga yang bisa diisi ulang dan dipergunakan kembali.

Saat bertemu dengan Anggota DPR Fraksi PKS, para petugas sampah berharap agar kendaraan pengangkut sampah diremajakan atau diperbarui, karena yang ada saat ini sudah tidak layak.



# Antisipasi Covid-19, Aleg PKS Beri Bantuan APD Pada Warga

“Pemberian bantuan APD ini merupakan inisiatif saya bersama rekan-rekan di PKS sebagai bentuk perhatian kami kepada masyarakat, Alhamdulillah dananya terkumpul yang akhirnya kami alokasikan untuk pembelian APD yang kemudian kami serahkan untuk warga kabupaten pandeglang dan lebak

**Dr. H.R. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Banten II

Pandeglang (28/03) — Anggota DPR RI dari Partai PKS Dapil Banten H. Achmad Dimiyati Natakusumah serahkan bantuan Ratusan Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Disinfektan dan lain-lain untuk masyarakat di 2 Kabupaten yang ada diprovinsi Banten yakni Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Dimiyati atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ndeh ini menuturkan, Bantuan tersebut merupakan hasil

penggalangan dana dari dirinya dan rekan-rekan se partainya.

“Pemberian bantuan APD ini merupakan inisiatif saya bersama rekan-rekan di PKS sebagai bentuk perhatian kami kepada masyarakat, Alhamdulillah dananya terkumpul yang akhirnya kami alokasikan untuk pembelian APD yang kemudian kami serahkan untuk warga kabupaten pandeglang dan lebak.” Tuturnya.

Selain pemberian bantuan

ini, kedepan pihaknya masih memiliki agenda-agenda lain terkait dengan mewabahnya virus corona ini, hanya saja bentuknya apa Dimiyati masih enggan untuk membocorkan. “yang pasti Insyaa Allah kami akan kembali melakukan pemberian bantuan guna membantu saudara-saudara yang saat ini tengah diguncang wabah covid-19. Bentuknya apa masih diffikirkan.” Tambahnya

Terkait dengan tingginya angka ODP dikabupaten pandeglang yang mencapai 370 orang dan PDP 8 orang, dirinya mengajak seluruh warga agar menerapkan pola hidup sehat dan bersih, serta lockdown dirumah untuk sementara waktu jika tidak ada hal yang penting seperti yang dihimbau oleh pihak pemerintah.

Jika dalam proses ini ada warga yang tidak memiliki persediaan hidup agar segera menghubungi pihak desa, kecamatan atau pemerintahan terdekat agar segera diberikan bantuan



# Cegah Covid-19, Nevi Zuairina Bagikan Hand Sanitizer dan Disinfektan

Kita bareng-bareng aja untuk berkontribusi mencegah penyebaran wabah ini. Tidak saling menyalahkan, tapi saling mengingatkan kalo ada janji yang mesti ditunaikan, ya segera ditunaikan. Yang penting ada ke-  
raja nyata yang dapat dirasakan masyarakat

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumbar II

Padang (28/03) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Nevi Zuairina bekerjasama dengan masyarakat Sumbar menyasar ratusan titik untuk disemprot disinfektan guna mencegah penyebaran virus corona.

Kegiatan ini direncanakan akan dilakukan hingga 2 pekan kedepan hingga mencapai target sebanyak-banyaknya titik di seluruh kabupaten kota yang masuk wilayah daerah pemilihannya.

"Saya bersama seluruh tim yang terbentuk, akan melakukan pembagian sanitizer dan melakukan penyemprotan sama-

mpunya. Kegiatan ini seiring dengan perpanjangan masa reses DPR RI sekaligus menunda masa sidang agar dapat melayani rakyat lebih panjang. Program dan kegiatan ini akan memberi kontribusi dukungan proses karantina masal di ibukota", jelas Anggota dari daerah pemilihan Sumatera Barat II.

Anggota Komisi VI ini menguraikan, bahwa titik yang disasar pada pembagian sanitizer dan penyemprotan disinfektan adalah rumah-rumah warga maupun sarana publik seperti Mushollah masjid,

pasar, sarana olahraga, maupun pos keamanan lingkungan.

Politisi PKS ini juga mengatakan, pemerintah saat ini sudah berupaya semampunya. Guna turut berkontribusi seiring dengan apa yang dilakukan pemerintah, ia juga melakukan hal yang mampu dilakukan bekerja sama dengan masyarakat memberikan yang terbaik pada penyelesaiannya.

"Kita bareng-bareng aja untuk berkontribusi mencegah penyebaran wabah ini. Tidak saling menyalahkan, tapi saling mengingatkan kalo ada janji yang mesti ditunaikan, ya segera ditunaikan. Yang penting ada kerja nyata yang dapat dirasakan masyarakat", tukas Nevi

Anggota Fraksi PKS ini agak menyayangkan, terkait ada janji pemerintah yang telah mengemukakan sejak lima hari lalu, akan menanggukuhkan cicilan kredit usaha kecil, tukang ojek dan nelayan, namun hingga kini belum ada realisasinya.

Nevi menyadari, bahwa upaya kelompok-kelompok, upaya institusi atau malah



pribadi-pribadi, akan memberi dampaknya hanya skala kedaerahan ataupun kewilayahan. Namun Upaya pemerintah, yang membuat kebijakan strategis membanding meluasnya wabah ini akan memberi dampak secara nasional. Untuk itu, Anggota DPR ini mendorong agar APBN dapat semaksimal mungkin digunakan untuk

penanganan Covid -19.

"Situasi saat ini sudah mulai terasa di masyarakat, bahwa usaha dan penghasilan masyarakat banyak yang lumpuh. Selain pekerjaan terganggu yang berdampak pada penghasilan, dampak psikologis turut menambah beban masyarakat", tutup Nevi Zuairina.

## PROFIL

## H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A



Ketahanan Bangsa terbangun  
dari Ketahanan  
**KELUARGA**

**B**ismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan dan sahabat Fraksi PKS DPR RI, tetap semangat dan senantiasa jaga kesehatan.

Sebagaimana kita tahu saat ini kita menjalani hari yang tidak normal dimana kita sedang mengalami ujian yang luar biasa, sebangsa dan setanah air bahkan seluruh warga dunia.

InsyAllah dalam program #KeluargaPKS pekan ini kita akan berkenalan dengan Anggota DPR RI kelahiran Melayu H. Syahrul Aidi Maazat, L.c., M.A. Kelahiran Kampar, 21 September 1977. Syahrul Aidi terjun ke dunia politik sejak usia yang

relatif muda, dua periode sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari 2009 -2014, kemudian berlanjut di tahun 2014-2019. Selepas itu beliau menjejak ke gedung kura-kura sebagai Anggota DPR RI dari Dapil Riau II.

Kehidupan Syahrul Aidi kental dengan nilai-nilai agama dan mengaliq dalam kehidupannya, pun sejak awal serius menempuh pendidikan agama di tempat terbaik. Meraih gelar sarjana Universitas Al-Azhar Mesir dan magister di Universitas Al-Albayt Yordania. Hingga pada akhirnya di senaya sesuai dengan amanah

sebagai Ketua GKSB Palestina di DPR RI.

Syahrul Aidi lahir dan besar di Kampar, salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribu kota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di Provinsi Riau.

Menemukan tambatan cintanya dengan Bitriyanti, kini Alhamdulillah dikarunia 4 putra dan 2 putri. Menjalin bahtera rumah tangga sudah menginjak usia 26 tahun dengan sejumlah lika liku suka.

Pesan Syahrul Aidi bagi

keluarga Indonesia "Bangun ketahanan keluarga maka akan terbangun ketahanan bangsa "

### SOCMED

Untuk mengetahui sepak terjang H. Syahrul Aidi, Lc.,MA dapat mengikuti social media:

Facebook :  
H. Syahrul Aidi,  
Lc.,MA  
Instagram :  
@syahrulaidi



Bangun ketahanan  
keluarga maka akan  
terbangun ketahanan  
bangsa

*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*





Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

# KANAL RESMI FRAKSI PKS DPR RI



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI

[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)